

**EFEKTIVITAS PERAN BAHAGIAN SOKONGAN
KELUARGA (BSK) DALAM PENUNTUTAN NAFKAH
ANAK PASCA PERCERAIAN PERIODE 2020-2022
(Studi di Mahkamah Tinggi Syariah Perlis, Malaysia)**

SKRIPSI



Oleh:

AMJAD IRFANI BIN ARPAN

NIM. 170101093

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2023 M/1444**

**EFEKTIVITAS PERAN BAHAGIAN SOKONGAN
KELUARGA (BSK) DALAM PENUNTUTAN NAFKAH
ANAK PASCA PERCERAIAN PERIODE 2020-2022
(Studi di Mahkamah Tinggi Syariah Perlis, Malaysia)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

AMJAD IRFANI BIN ARPAN

NIM. 170101093

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I, **R - R A N I R Y** Pembimbing II,



Dr. Badrul Munir, Lc., MA
NIDN: 2125127701



Muhammad Husnul, M.H.I.
NIP: 199006122020121013

**EFEKTIVITAS PERAN BAHAGIAN SOKONGAN
KELUARGA (BSK) DALAM PENUNTUTAN NAFKAH
ANAK PASCA PERCERAIAN PERIODE 2020-2022**

(Studi di Mahkamah Tinggi Syariah Perlis, Malaysia)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Hari, Khamis/21 Desember 2023 M
8 Jumadil Akhir 1445H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

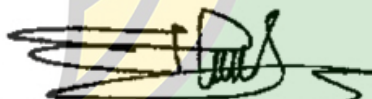
Ketua

Sekretaris


Dr. Badrul Munir, Lc., M.A.

NIDN: 2125127701

Penguji I

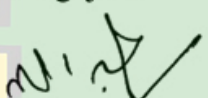

Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I.

NIP: 199006122020121013

Penguji II


Bukhari Ali, S.Ag., MA

NIP: 197611132014111001


Shabarullah, M.H.

NIP: 199312222020121011

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDA ACEH TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amjad Irfani Bin Arpan
NIM : 170101093
Jurusan : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskahkarya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
4. **Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
5. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Desember 2023

Yang menyatakan,



(Amjad Irfani Bin Arpan)

ABSTRAK

Nama : Amjad Irfani Bin Arpan
NIM : 170101093
Fakultas/Prodi : Syariah & Hukum / Hukum Keluarga
Judul : Efektivitas Peran Bahagian Sokongan Keluarga dalam Penuntutan Nafkah Anak Pasca Perceraian Periode 2020 -2022 (Studi di Mahkamah Tinggi Syariah Perlis, Malaysia)
Tebal Skripsi : 80 Halaman
Pembimbing I : Dr. Badrul Munir, Lc., MA
Pembimbing II : Muhammad Husnul, M.H.I

Kata kunci: *Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) dan Penuntutan Nafkah Anak*

Nafkah merupakan hak anak yang perlu dilaksanakan oleh ayah. Kewajiban menafkahi telah termaktub di dalam Al-Quran bagi seorang perlu menyediakan nafkah buat anaknya baik dalam ikatan perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian. Namun, akhir-akhir ini, banyak kasus yang melibatkan perilaku ayah yang mengabaikan nafkah anak pasca perceraian. Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) merupakan pihak berwenang yang mampu mengatasi segala permasalahan berkaitan dengan pemberian nafkah. Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana peran BSK dalam menjamin terpenuhinya nafkah isteri pasca perceraian dan bagaimana efektifitas BSK terhadap masalah penegakan nafkah isteri pasca perceraian. Untuk memperoleh jawabannya, maka dalam skripsi ini penulis menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu kajian lapangan (*field research*) dan penelitian yuridis normatif yaitu kajian kepustakaan (*library research*). Adapun Metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan telah dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSK memainkan peran dalam masalah pemenuhan nafkah isteri pasca perceraian secara efektif. BSK turut memantau masalah ketidakpatuhan terhadap perintah Mahkamah Syariah melalui pembentukan Unit Khidmat Nasehat dan Perundangan, Unit Penguatkuasaan dan Pelaksanaan Perintah dan Unit Pengurusan Dana. Keberadaan BSK menjadi suatu bagian penting untuk memberikan bantuan kepada anak yang tidak mendapat nafkah karena kegagalan mematuhi perintah nafkah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“EFEKTIVITAS PERAN BAHAGIAN SOKONGAN KELUARGA (BSK) DALAM PENUNTUTAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN PERIODE 2020-2022 (Studi di Mahkamah Tinggi Syariah Perlis, Malaysia)”**

Dalam penulisan skripsi ini, tentu banyak pihak yang telah memberi dorongan, dukungan dan motivasi. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Karena penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari mereka penulis tidak dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Badrul Munir, Lc., MA sebagai pembimbing I yang selalu memotivasi dan memberi bimbingan yang tak terhingga. Ucapan terima kasih juga kepada Bapak Muhammad Husnul, M.H.I. sebagai pembimbing II.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh beserta stafnya.
3. Bapak Dr. Agustin Hanapi H. Abd Rahman, Lc., MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, Ibuk Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.h selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga, tak lupa pula kepada Ibuk Dr. Khairani, S.Ag.

M.Ag sebagai penasehat akademik dan seluruh staf yang ada di Prodi Hukum.

4. Bapak dan Ibu dosen pengajar dan Seluruh Staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry yang telah melayani kami para mahasiswa dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi.
5. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada keluarga tercinta ayahanda Arpan Bin Shaari dan ibunda Basyira Binti Omar yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta motivasi dan doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT untuk penulis, dan kepada adik beradik yang lain yang banyak memberikan motivasi dan dukungan.
6. Ucapan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga leting 2017 dan seluruh teman/adik/mahasiswa/i Hukum Keluarga yang penulis banggakan yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan gelar yang diimpikan selama ini.
7. Dan tidak lupa pula ucapan terima kasih kepada teman saya Findika Anhar yang membantu penulis dalam membetulkan penulisan dan format penulis.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh, 12 Desember 2023
Penulis,


Amjad Irfani Bin Arpan

TRANSLITERASI

Dalam penelitian ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. Karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan istilah Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K No: 158 Tahun 1987 dan No: 0543B/U/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	

15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				
----	---	---	----------------------------	--	--	--	--

2. Vokal

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
------------------	------	-----------------

اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati dan mendapat harkat sukun, transliterasinya ialah h

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul*

Munawwarah

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I

Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing

Lampiran II

Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum



DAFTAR GAMBAR

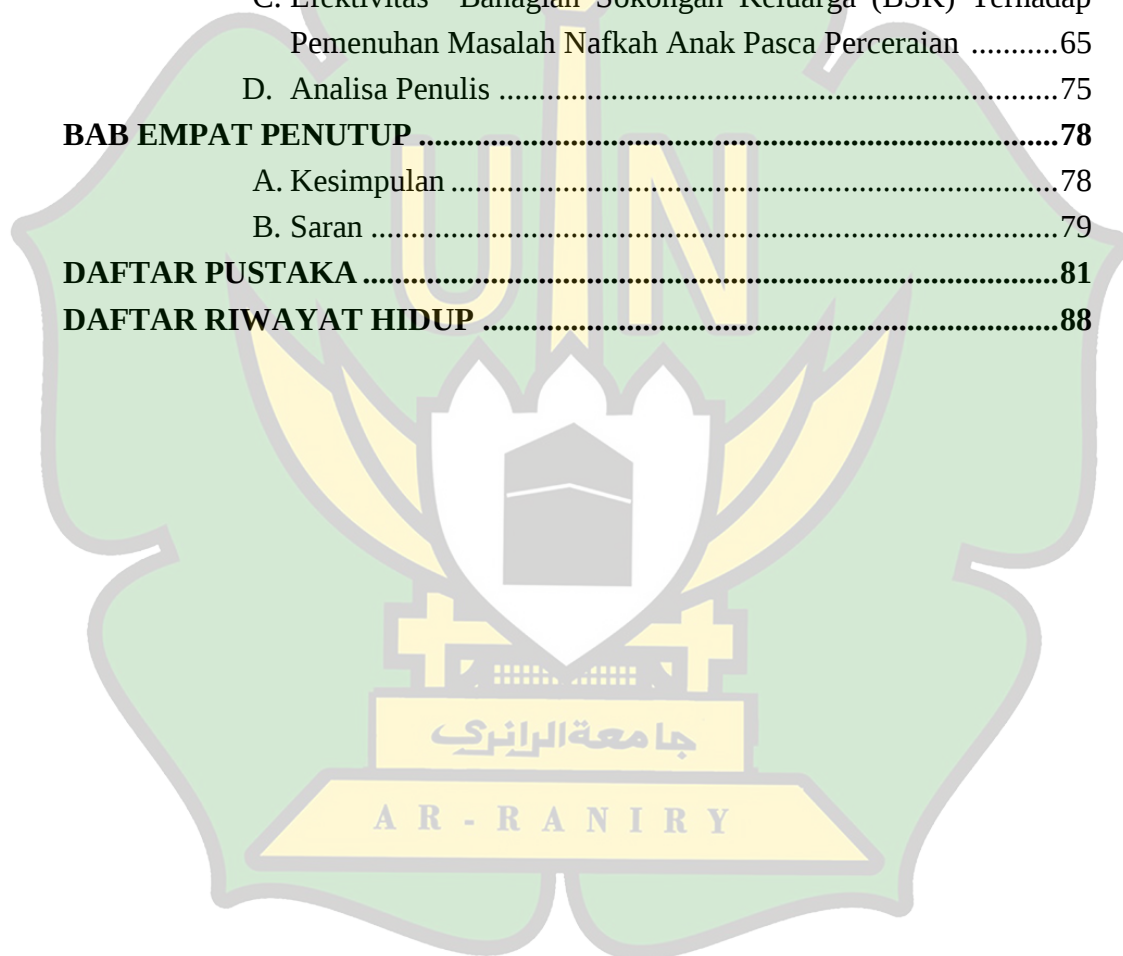
- Gambar I Sesi wawancara bersama Tuan Jaidil, Pengarah Kanan di Seksyen Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) di Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perlis (JKSNP)
- Gambar II Penyampaian Cenderahati kepada Tuan Jaidil sebagai tanda penghargaan atas masa yang diluangkan
- Gambar III Carta Organisasi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perlis



DAFTAR ISI

ABSTRAK	I
KATA PENGANTAR	II
TRANSLITERASI	IV
DAFTAR LAMPIRAN	VIII
DAFTAR GAMBAR	IX
DAFTAR ISI	X
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	10
F. Metode Penelitian	12
1. Jenis penelitian.....	12
2. Pendekatan penelitian.....	12
3. Sumber data.....	13
4. Teknik pengumpulan data	14
5. Objektivitas dan validitas data	14
6. Teknik analisis data.....	14
7. Pedoman penulisan.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA LANDASAN TEORITIS NAFKAH ANAK MENURUT HUKUM ISLAM	18
A. Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah Anak	18
B. Nafkah Anak Pasca Perceraian	24
C. Macam-macam Nafkah Anak Pasca Perceraian	28
D. Penegasan Tuntutan Nafkah Dalam Islam	38
E. Teori Efektivitas	46

BAB TIGA EFEKTIVITAS PERAN BAHAGIAN SOKONGAN KELUARGA (BSK) DALAM MENJAMIN TERPENUHINYA NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI MAHKAMAH TINGGI SYARIAH PERLIS	52
A. Profil Pembentukan Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) ...	52
B. Peran Bahagian Sokongan Keluarga Dalam Penentuan Nafkah Anak Pasca Perceraian	59
C. Efektivitas Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) Terhadap Pemenuhan Masalah Nafkah Anak Pasca Perceraian	65
D. Analisa Penulis	75
BAB EMPAT PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	88



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan sebuah fitrah sesuai dengan janji Allah terhadap manusia sejak wujudnya peradaban manusia di dunia ini bermula dari Nabi Adam dan pasangannya Siti Hawa sehingga sekarang. Oleh kerana asal penciptaan mereka berpasangan, maka selayaknya hubungan suami istri diwarnai dengan cinta, kasih sayang dan saling mengarahkan ke arah kebaikan dan ketakwaan. Setiap pasangan memberikan kebahagiaan, pertolongan, kelembutan terhadap pasangannya, yang dijalani atas dasar ketakwaan, keikhlasan dan kesetiaan.¹

Asal makna *Nafkah* ialah mengeluarkan atau menghabiskan. Perkataan *Nafkah* (mengeluarkan atau menghabiskan) hanya digunakan dengan makna yang baik sahaja. Nafkah menurut istilah ialah semua perkara yang diperlukan oleh manusia seperti makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Disebutkan *Nafkah`* kerana iya dikeluarkan atau dihabiskan dengan tujuan mendapatkan keperluan di atas.² Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu

¹ Nasrudin Bin Hassan & Wan Hamidah Binti Wan Daud, *Fiqh Keluarga Syurgawi*, (Pekan Sungai Besi, Kuala Lumpur : Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, 2021), hlm. 66

² Mustofa Al-Khin, Mustofa Al-Bugho & Ali Asy-Syarbaji, *Kitab Fikah Mazhab Syafie*, (Batu Caves, Kuala Lumpur : Pustaka Salam, 2014), hlm. 863

(segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.³

Berdasarkan ayat di atas, Allah memberikan sebuah panduan mengenai hak-hak dari istri setelah diceraikan oleh suami. Ini berarti tanggung jawab suami memberi nafkah kepada istri bukan saja sewaktu hidup bersama tetapi juga selepas bercerai istri dan jenis perceraian yang dimaksudkan adalah perceraian yang berkaitan dalam hal cerai talak. Antara tanggung jawab ayah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Keluarga Islam adalah menyediakan nafkah kepada ibu dan anak selama perkawinan, nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pasca berlakunya perceraian. Isu yang biasa terjadi di Mahkamah Syariah pula ialah pengabaian pembayaran nafkah oleh ayah kepada ibu dan anak. Bahkan, meskipun mahkamah mengeluarkan perintah pembayaran nafkah, masalah pelaksanaan perintah tersebut juga masih tidak selesai.⁴

Di Malaysia Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) merupakan bahagian yang berada di bawah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) menyangkut daripada permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penguatkuasaan perintah nafkah dalam lingkungan keluarga. Menyedari daripada permasalahan dalam pengabaian perintah Mahkamah Syariah berkaitan dengan pembayaran nafkah, maka atas dasar kebijakan daripada Mesyuarat Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia kali ke-46 pada 7 Juni 2007 yang dipengerusikan oleh Mantan Perdana Menteri Y.A.B. Dato' Seri Abdullah Bin Hj. Ahmad Badawi telah memutuskan agar BSK didirikan. Keputusan ini direalisasikan pada bulan Oktober 2008 apabila BSK didirikan dan mulai beroperasi sejak April 2009 dengan menempatkan sejumlah 96 orang pegawai

³ QS. At-Talaq (65): 6

⁴ Najibah Mohd Zin, *Undang-Undang Keluarga (Islam)*, Siri perkembangan undang-undang di Malaysia, 2007, hlm. 155.

dan staf JKSM di seluruh Mahkamah/Jabatan Kehakiman Syariah Negeri-negeri.⁵

Pembentukan Bahagian Sokongan Keluarga Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perlis (BSK JKSNP) dibentuk pada tahun 2009 sebagai penegak hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan implementasi dan penegakan perintah nafkah yang meliputi nafkah anak, nafkah 'iddah atau istri yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Perlis. Dari sudut unit-unit yang berada di dalam Seksyen Bahagian Sokongan Keluarga Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perlis terdapat tiga jenis unit yaitu Unit Khidmat Nasihat Perundangan (UKNP), Unit Pengurusan Dana (UPN), Unit Penguatkuasaan & Pelaksanaan Perintah (UPPP).⁶

BSK merupakan satu bagian baru yang diwujudkan daripada permasalahan, pelaksanaan dan penegakan hukum perintah pembayaran nafkah yang berfungsi untuk memberi jaminan bagi anak dalam melakukan pemantauan kembali terhadap perintah nafkah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah. Apabila perintah nafkah telah dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah terhadap si ayah, beliau harus melaksanakannya, akan tetapi jika pihak mantan suami mengingkarinya dengan mengabaikan perintah tersebut selama satu bulan, maka kasus ini boleh diajukan oleh si ibu kepada BSK agar dapat mengambil tindakan lebih lanjut dalam menangani kasus ini.

⁵ Mohd Radzi Abd Latif, *Laporan Tahunan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia*, (Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, Putrajaya : Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, 2011), hlm. 50

⁶ Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. 2021. *Laporan Tahunan JKSM 2020*. Oktober. Nassir bin Abdul Aziz. Kuala Lumpur. Malaysia. <https://fliphtml5.com/wsnr/eeoz/basic/51-100> hlm. 52

Tuntutan nafkah anak terhadap ayah dan penegakan hukum perintah nafkah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah selepas berlakunya perceraian sering menjadi isu besar dalam kalangan mantan isteri di Malaysia⁷. Walaupun Undang-undang Keluarga Islam Perlis telah mengatur secara perinci tentang nafkah, namun terdapat kelemahan pada tatacara penerapannya, terutama apabila mantan suami tidak memiliki niat yang baik dalam melaksanakannya.

Menurut Enakmen 7 Undang-Undang Keluarga Islam Perlis 2006, Seksyen 73 menetapkan bahwa kewajiban dalam menanggung nafkah anak pasca perceraian:⁸

1. “Kewajipan bagi si suami dalam menanggung hak nafkah anaknya, walaupun anak itu sama ada berada dalam jagaanya atau jagaan orang lain tetap perlu menyediakan kelengkapan kepada anaknya itu dengan tempat tinggal, pakaian, makanan, perubatan dan pelajaran sebagaimana yang munasabah memandang kepada kemampuan dan taraf kehidupannya atau dengan membayar kosnya. Melainkan jika ada sesuatu perjanjian ataupun suatu perintah daripada Mahkamah yang telah menetapkan maka harus tertakluk kepada ketetapan daripada keputusan Mahkamah.”
2. “Jika ayah kepada anak tersebut telah meninggal dunia atau tempat bapanya berada tidak diketahui atau jika dan setakat mana bapanya tidak berupaya menanggung nafkah anaknya itu, maka adalah menjadi suatu kewajipan seseorang daripada keluarga yang berdekatan dengan anak itu akan menjadi penjaga sesuai dengan ketetapan di bawah Hukum Syarak.”

Dengan adanya ketentuan ini, memberikan peluang kepada anak dalam menuntut nafkah jika sekiranya ayah gagal dalam melunaskan pembayaran atau enggan dalam membayar nafkah dan sekaligus mengembalikan hak anak tersebut. Bahkan, dengan adanya ketentuan ini adalah merupakan sebagai jaminan hukum agar tidak adanya sebarang pelecehan terhadap hak anak. Hal ini bertepatan dengan fungsi Mahkamah Syariah untuk memertabatkan syi‘ar Islam dengan penerapan undang-undang Islam dalam membicarakan dan memutuskan

⁷ Roslina Che Jusoh, *Jurnal Kanun, Bahagian Sokongan Keluarga Membantu Anak Selepas Perceraian: Keberkesanan, Cabaran Dan Perbandingan Dengan Amalan Negara Maju*, 2017, hlm. 61.

⁸ Seksyen 73 (1) dan (2), Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Perlis) 2006

kasus-kasus yang diatur dalam enakmen juga berfungsi sebagai lembaga pengurusan masalah kekeluargaan⁹.

TAHUN	DAFTAR KASUS UKNP	KASUS SUKSES DISELESAIKAN	SISA
2019	48	47	1
2020	42	37	6
JUMLAH	90	84	7

Table 2. Statistik Pencapaian Unit Khidmat Nasihat dan Perundangan (UKNP)

TAHUN	DAFTAR KASUS UPPP	KASUS SUKSES DISELESAIKAN	SISA
2019	38	36	2
2020	37	23	16
JUMLAH	68	59	18

Table 3. Statistik Pencapaian Unit Penguatkuasaan dan Pelaksanaan Perintah (UPPP)

Daripada sejumlah data yang diterima bagi kasus yang melibatkan BSK di Mahkamah Tinggi Syariah Perlis¹⁰, dapat dianalisis bahwa impak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) pada tahun 2020 dari akibat pandemi Covid-19 turut memberikan kesan perjalanan Bahagian Sokongan Keluarga (BSK). Perbandingan pada tahun 2019 dan 2020 ada kemunduran perlaksanaan dari segi pengurusan jadual pertemuan dengan pegawai, mahkamah perlu kepada masa penyusunan, adanya penangguhan serta pemanjangan tempoh pertemuan antara pihak pegawai BSK dan pihak-pihak yang bertikai disebabkan sebahagian pihak tidak dapat menghadirkan diri pada pertemuan kali pertama. Antara faktor

⁹ Nan Mardhiatul Akmal binti Long Kamaruddin, “Efektifitas Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) dalam Penyediaan Dana Cadangan Untuk Nafkah Isteri dan Anak (Studi Kasus di Mahkamah Tinggi Syariah Terengganu)”, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syaria’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015, hlm. 2.

¹⁰ Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. 2021. *Laporan Tahunan JKSM 2020*. Oktober. Nassir bin Abdul Aziz. Kuala Lumpur. Malaysia. <https://fliphtml5.com/wsnr/eeoz/basic/51-100> hlm. 56

ketidakhadiran pihak pemohon dan pihak responden termasuklah larangan rentas daerah yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah Malaysia.

Namun begitu, dalam keadaan tertentu terdapat beberapa perkara yang perlu diteliti supaya mekanisme penggunaan perkhidmatan keadilan di Mahkamah Syariah dalam talian tidak disalahgunakan. Pemahaman kepada etika dan tatacara perkhidmatan atas talian perlu disebarkan sebaik mungkin supaya pelaksanaan dapat bergerak dengan lancar dan sistematik dalam memastikan keadilan sentiasa menjadi keutamaan.

Mengingat situasi dan kondisi yang ada pada umat Islam di Malaysia yang semakin hari kasus perceraian semakin meningkat turut pengabaian pada nafkah pasca perceraian turut meningkat dalam lingkungan masa pandemi Covid-19, sehingga menyebabkan banyak kasus perlu diselesaikan susulan pasca Covid-19. Oleh karena itu, dari latar belakang diatas menarik minat peneliti mengkaji secara mendalam dengan melakukan penelitian ilmiah tentang ***“Efektivitas Peran Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) Dalam Penentuan Nafkah Anak Pasca Perceraian Periode 2020-2022 (Mahkamah Tinggi Syari’ah Perlis, Malaysia)”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang disebutkan di atas, maka dapat dirumuskan kepada beberapa permasalahan, yaitu:

- 1) Bagaimana proses pelaksanaan peran Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Mahkamah Tinggi Syari’ah Perlis, Malaysia?
- 2) Bagaimanakah efektivitas upaya pemenuhan nafkah anak pasca perceraian yang dilakukan oleh Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) dari tahun 2020 sampai 2022 di Mahkamah Tinggi Syari’ah Perlis, Malaysia?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telahpun diuraikan di atas, maka penelitian ini adalah bertujuan:

- 1) Untuk mengetahui peran Bahagian Sokongan Keluarga dalam menjamin dari terpenuhinya nafkah anak pasca perceraian.
- 2) Untuk mengetahui efektifitas Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) terkait dari masalah penegakan kepada nafkah anak pasca perceraian.

D. Kajian Pustaka

Pembahasan penelitian terkait Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) sudah ada beberapa pengkaji yang sudah mengkaji dan meneliti badan atau unit ini, namun demikian penulis ingin meneliti dan membahaskan badan atau unit ini adalah dalam usaha untuk mengangkat persoalan penyelesaian tuntutan nafkah kepada anak pasca perceraian suami istri di negeri Perlis, Malaysia dengan menggunakan metode penelitian secara studi kasus. Ada beberapa penelitian yang dapat ditemukan yang turut membahaskan dan membuat penelitian terkait Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) atau nafkah anak pasca perceraian ada kesamaan dengan tema dan topik dari penulis.

Penelitian yang dilakukan dengan judul *“Penggunaan Mediasi di Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) (2010-2020): Satu Analisa”* karya Jazilah binti Mohd Saad, Muhammad Amir Firdaus Bin Sidin dan Hanna Ambaras Khan. Karya ini adalah bertujuan untuk melihat pencapaian BSK dalam tempoh 10 tahun sesudah dibentuk. Dari hasil penelitian, iya merupakan sebuah saranan dan cadangan kepada BSK bagi kebaikan untuk masa hadapan. Jika dilihat dari pada hasil analisa yang dicadangkan tersebut adalah memberi lebih banyak latihan kepada pegawai dalam menyediakan tempat yang lebih selesa dan menawarkan mediasi atas talian sebagai alternatif kepada kasus yang melibatkan masalah jarak dan masa sekiranya pihak-pihak bersetuju.¹¹

¹¹ Jazilah Mohd Saad @Mat Saud, Muhammad Amir Firdaus Sidin dan Hanna Ambaras Khan. Februari 2020. International Conference on Family Law 2020. *Penggunaan Mediasi di Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) (2010-2020): Satu Analisa*.

Penelitian kedua ini berkenaan *“Isu Tunggakan Nafkah: Keperluan Penubuhan Bahagian Sokongan Keluarga (BSK)”* karya Nur Zulfah MD Abdul Salam bersama Nur Syazwani Mohd Khatib. Penelitian ini berfokus kepada BSK secara langsung dalam memberi khidmat nasihat dan perundangan Syariah kepada pihak-pihak yang terlibat secara khusus berkaitan tuntutan nafkah serta tatacara penguatkuasaan dan pelaksanaan penghakiman selepas suatu penghakiman atau perintah dibuat oleh Mahkamah Syariah. Walau bagaimanapun, wujud juga kekangan dalam melicinkan proses pembayaran nafkah ini antaranya Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) menghadapi masalah dalam pengurusan kewangan dan memerlukan dana yang secukupnya dalam membantu ibu dan isteri yang terlibat dalam masalah nafkah. Namun pada 17 September 2019, pihak BSK telah menerima sumbangan dana sebanyak RM 100,000 dari Kerajaan Negeri Selangor bagi tujuan Dana Bantuan Nafkah yang memberikan nafas dalam menyelesaikan kasus khusus di negeri bahagian Selangor.¹²

Berikutnya penelitian tentang *“Bahagian Sokongan Keluarga Membantu Anak Selepas Perceraian: Keberkesanan, Cabaran dan Perbandingan Dengan Amalan Negara Maju”* merupakan karya Roslina Che Soh@Yusoff, Nurhidayah Muhammad Hashim dan Mohd. Na'im Mokhtar. Disebutkan di dalam penelitian ini berkenaan menyentuh soal ketiadaan tauliah peguam syarii kepada pegawai BSK menyebabkan usaha mempercepat kutipan dana pendahuluan dan penguatkuasaan perintah nafkah menjadi agak terbantut dan melambatkan penyelesaian sesuatu kes. Maka ditegaskan bahawasanya Malaysia secara umum untuk menaik taraf kekuasaan dan kewenangan BSK dalam menguatkuasakan perintah sedia ada, sekali gus melihat kembali formula dan cara nafkah ditaksir,

¹² Nur Zulfah Md Abdul Salim dan Nur Syazwani Mohd Khatib. 29 April 2020. Jurnal of Muwafaqat. *Isu Tunggakan Nafkah : Keperluan Penubuhan Bahagian Sokongan Keluarga (BSK)*.

serta formula yang wajar diperkenalkan demi menjaga kebajikan anak pasca perceraian.¹³

Selanjutnya daripada berkenaan sebuah penelitian “*Cabaran Pemeraksanaan Mahkamah Syariah Melalui Syariah Peranan Bahagian Sokongan Keluarga di Sarawak*” adalah karya Roslina Che Soh@Yusoff, Nurhidayah Muhammad Hashim dan Mohd. Na’im Mokhtar. Karya ini meneliti soal cabaran secara literasi maklumat penguatkuasaan penghakiman melalui peranan BSK Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) di Sarawak. Program dan aktiviti literasi maklumat di peringkat masyarakat awam khususnya di luar bandar terhadap kefahaman penguatkuasaan penghakiman ini telah dilaksanakan oleh BSK JKSM di Sarawak secara mendasar. Pandemi Covid-19 bukan halangan bagi meneruskan literasi maklumat ini bahkan memberi peluang bagi menyampaikan maklumat perkhidmatan kepada masyarakat.¹⁴

Seterusnya adalah daripada jurnal dengan judul “*Penguatkuasaan dan Pelaksanaan Penghakiman Mahkamah Syariah: Kajian di Bahagian Sokongan Keluarga Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (Seksyen Sarawak) Terhadap Hak Wanita dan Kanak-kanak*” karya Zulzaidi Mahmod, Ahmad Hidayat Buang dan Afifah Baharuddin. Karya ini menerangkan tentang suatu keperluan wajar bagi membantu wanita dan anak-anak menurut perspektif undang-undang serta harus diperkasakan Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) secara holistik dengan penambahan staf sesuai faktor geografi di Sarawak. Dari hasil penilitian jurnal ini, hak wanita dan kanak-kanak terutama dari aspek kewangan perlu diberi keutamaan bagi memastikan kebajikan dan kelangsungan hidup wanita dan anak-anak terjamin. Namun begitu, Institusi Kehakiman Syariah di Malaysia tidak

¹³ Roslina Che Jusoh, *Jurnal Kanun, Bahagian Sokongan Keluarga Membantu Anak Selepas Perceraian: Keberkesanan, Cabaran Dan Perbandingan Dengan Amalan Negara Maju*, 2017

¹⁴ Zulzaidi Mahmod, Ahmad Hidayat Buang dan Afifah Baharuddin. 16 Februari 2022. *Cabaran Pemeraksanaan Literasi Maklumat Penguatkuasaan Penghakiman Mahkamah Syariah Melalui Peranan Bahagian Sokongan Keluarga di Sarawak*.

hanya menjalankan fungsi bagi mengeluarkan penghakiman untuk kes induk, tetapi perlu juga bagi kes penguatkuasaan dan pelaksanaan penghakiman dalam memastikan perintah yang dikeluarkan dipatuhi secara maksima dan berpelembagaan.¹⁵

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka dapat ditemukan bahwa belum ada yang memiliki kesamaan terhadap penelitian yang dibahas oleh penulis yaitu tentang peran Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) dalam penentuan nafkah anak pasca perceraian (Mahkamah Tinggi Syariah Perlis).

E. Penjelasan Istilah

Dalam penulisan karya ilmiah, sangat diperlukan penjelasan istilah untuk mengetahui ruang lingkup pembahasan dan untuk menghindari terjadi salah penafsiran skripsi. Adapun istilah tersebut yaitu:

1. Peran

Menurut kamus Umum Bahasa Indonesia peran bermaksud “beberapa tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat dan harus dilaksanakan”¹⁶ Peran adalah suatu konsep perilaku yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu yang dapat dalam masyarakat sebagai organisasi, selanjutnya dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut.

2. Jabatan Agama Islam Negeri Perlis

Jabatan Agama Islam Negeri Perlis ini merupakan suatu institusi atau lembaga yang bertanggungjawab dan berkewenangan dalam

¹⁵ Zulzaidi Mahmud, Ahmad Hidayat Buang dan Afifah Baharuddin. September 2021. *Journal of Islamic, Social, Economics and Development (JISED)*. *Penguatkuasaan dan Pelaksanaan Penghakiman Mahkamah Syariah : Kajian di Bahagian Sokongan Keluarga Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (Seksyen Sarawak) Terhadap Hak Wanita dan Kanak-Kanak*.

¹⁶ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998) hlm. 667

menangani terkait permasalahan agama, keluarga, maupun kesalahan jenayah syariah di Negeri Perlis, Malaysia.¹⁷

3. Bahagian Sokongan Keluarga

Bahagian Sokongan Keluarga (Lembaga Penasehat dan bantuan Keluarga) merupakan sebuah departemen di bawah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia yang menjalankan fungsinya di Mahkamah Syariah. BSK merupakan satu bahagian baru yang ditubuhkan rentetan daripada permasalahan, implementasi dan penegakan hukum perintah pembayaran nafkah yang berfungsi untuk memberi jaminan bagi istri melakukan pemantauan kembali terhadap perintah nafkah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah. Tugas utama BSK adalah memastikan perintah yang diputuskan oleh mahkamah dihormati dan dilaksanakan oleh mantan suami.¹⁸

4. Mahkamah Syariah

Pengadilan Agama yang berwewenang dalam menegakkan hukum. Mahkamah Syariah ditubuhkan oleh Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri berfungsi membicarakan kasus-kasus yang diperuntukan oleh enakmen. Mahkamah Syariah juga merupakan lembaga peradilan yang menangani dan menjatuhkan hukuman ke atas orang islam untuk pelanggaran perdata dan pidana sesuai dengan yuridikasi yang mereka miliki.

F. Metode Penelitian

¹⁷ Portal Rasmi Jabatan Agama Islam Negeri Perlis, Diakses pada 4/12/2023 dari situs <https://jaips.perlis.gov.my/index.php/ms/profil-jabatan/latarbelakang-jheaips>

¹⁸ Gerbang Rasmi Kerajaan Malaysia pada perkhidmatan Mengurus Institusi Keluarga kategori Khidmat Bantuan Bahagisn Sokongan Keluarga (BSK), Diakses pada 4/12/2023 dari situs <https://www.malaysia.gov.my/portal/content/28866?language=my>

Secara asasnya di dalam sebuah penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji berdasarkan judul pembahasan.

1. Jenis Penelitian

Metode penulis adalah penelitian kepustakaan (*Library research*) yang berupa studi terhadap efektivitas tentang peran Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) Negeri Perlis. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan meneliti suatu objek dengan peneliti berperan sebagai instrument kunci. Data dikumpulkan melalui teknik gabungan kemudian dianalisis secara kualitatif.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Maka pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu wawancara terpusat (*focused interviews*) dan penelitian yuridis normatif (*field research*) kerana penulis langsung ke lapangan kantor Bahagian Sokongan Keluarga Mahkamah Tinggi Syariah Perlis untuk menggali dan meneliti data yang ada di lapangan terhadap latar belakang yang dipermasalahkan.¹⁹Selain itu, digunakan juga penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan meneliti dan mengkaji kajian ilmiah sebagai data rujukan.

3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini ialah data sekunder dan data primer. Data sekunder merupakan bentuk penelitian atau studi pustaka,

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.36

sedangkan Data Primer merupakan bentuk studi atau penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (*library research*) yaitu mencari dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini. Teknik pengumpulan data atau bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a) Data Sekunder/ Studi Pustaka

Studi kepustakaan ini merupakan jenis data yang diperoleh melalui inventarisasi bahan hukum yang meliputi tiga bentuk, yaitu:

- Bahan hukum primer, yang terdiri dari Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Perlis 2006, Seksyen 73 yang telah menetapkan kewajiban dalam menanggung nafkah anak pasca perceraian. Serta dengan melalui cara wawancara langsung ke lapangan kantor Bahagian Sokongan Keluarga Mahkamah Tinggi Syariah Perlis bagi memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan menggunakan kaedah *interview guide* (panduan wawancara).
- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder yang sifatnya tidak terikat seperti, literatur-literatur hukum, makalah-makalah dalam seminar, jurnal ilmiah, dan berbagai tulisan tersebut lainnya.
- Bahan hukum tersier yakni yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data informasi yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung. Wawancara ini dilakukan secara langsung bertatap muka dan berpedoman

pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. Pengumpulan data melalui wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dengan pegawai kantor Mahkamah Tinggi Syariah Perlis, Malaysia.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Dalam analisis data salah satu kepada syarat yang dimiliki adalah data yang valid dan reliabel. Oleh kerana itu, dalam penelitian kualitatif perlukan kepada validitas data yang diteliti. Objektivitas data penelitian dilakukan dengan melihat reabilitas dan validasi dari data yang diperolehi, maka dengan teknik penelitian triangulasi peneliti melakukan wawancara langsung untuk mendapatkan hasil data yang valid.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dan bahan-bahan lainnya, dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Analisis yang dikerjakan peneliti dalam proses reduksi data ini adalah melakukan pemeriksaan dan pemilihan dan merangkum terhadap data-data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dengan responden, dan dokumentasi.

Tujuan melakukan proses reduksi adalah untuk penghalusan data. Proses penghalusan data adalah seperti perbaikan kalimat dan kata-kata yang tidak jelas, memberikan keterangan tambahan, membuang kata-kata yang tidak penting, termasuk juga menterjemahkan ungkapan setempat ke bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mengenai mereduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu penetapan mahar dalam pernikahan pada masyarakat di sana.

Menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dalam bentuk teks yang bersifat naratif²⁰. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. Maka yang menjadi tugas peneliti dalam proses penyajian data setelah data tersebut diolah adalah menganalisis data, dengan cara menguraikan permasalahan yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang diperoleh di lapangan sesuai dengan realitas untuk dideskripsikan secara kualitatif. Seperti menyajikan data tentang penuntutan nafkah kepada anak pasca perceraian dari pada Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) di Perlis. Data yang telah terkumpul, kemudia dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode seperti:

- Deduktif, yaitu melihat norma-norma yang ada dalam al-Quran dan as-Sunnah tentang *nafkah* secara umum menuju pandangan serta metode istinbat hukum dalam menentukan terkait jenis dan apa saja nafkah buat anak yang perlu ditanggung pasca perceraian.
- Induktif, yaitu merelevansikan peraturan perundang-undangan hukum islam di Malaysia dengan Badan Sokongan Keluarga (BSK) terkait nafkah anak pasca perceraian menurut undang-undang di negeri bagian Perlis, Malaysia.

7. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan proposal ini menggunakan pedoman pada buku penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang di terbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019 (Revisi 2019)

G. Sistematika Penulisan

²⁰ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.60

Skripsi ini ditulis dalam empat bab. Antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan hingga membentuk satu kesatuan. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab satu adalah pendahuluan yang menjadi pokok pembahasan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab teoritis yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam mengadakan penelitian. Penulis membahas bab ini mengenai definisi keluarga dan perkawinan menurut Islam, Selain itu mendefinisikan perceraian serta dasar hukumnya dalam Islam dan perspektif perundangan di Negeri Perlis, Malaysia. Selanjutnya bab ini juga akan menjelaskan sebab-sebab terputusnya perkawinan dalam hukum Islam. Selain itu, bab ini akan menjelaskan faktor-faktor terjadinya masalah rumah tangga dan bagaimana cara penyelesaian yang akan dilakukan menurut perspektif Islam.

Bab tiga adalah bab yang membahas tentang penemuan hasil dari pada penelitian yang telah dikemukakan tentang peran Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) dalam menjamin terpenuhinya nafkah anak pasca perceraian masa periode tahun 2020-2022, peranan Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) dalam tempoh masa periode tahun 2020-2022 bagi memastikan terpenuhinya nafkah anak pasca perceraian, serta efektifitas Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) terhadap permasalahan penegakan nafkah anak pasca perceraian. Seterusnya, mengenai analisis penulis terhadap Bahagian Sokongan Keluarga adalah berkenaan keberhasilan dalam menangani kasus-kasus bagi pengabaian nafkah anak dan bagaimana cara bagi mendapatkan mantan suami ini dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap nafkah anak dalam masa periode tahun 2020-2022.

Bab empat merupakan bab penutup di dalam penelitian ini, di dalam bab ini penulis akan mengambil beberapa kesimpulan dan juga beberapa saran yang akan dikemukakan sebagai pikiran yang dianggap relevan dengan pembahasan skripsi ini.

BAB DUA

LANDASAN TEORITIS NAFKAH ANAK MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah Anak

1. Pengertian Nafkah Anak

Dalam membahaskan sebuah pengertian berkaitan dengan nafkah anak, perlu terlebih dahulu diketahui pengertian bagi nafkah itu sendiri. Pengertian bagi nafkah menurut bahasa (Etimologi) adalah berasal daripada bahasa Arab yaitu dari kata *infaq*, yang merupakan isim *masdar majid* dari *infaqa*, *yunfiqu*, *infaaqotan*, yang berarti membelanjakan. Dari sudut pandangan para ahli fiqih, nafkah merupakan pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh orang yang wajib memberi nafkah kepada seseorang, baik dalam sesuatu seperti beras, garam, pakaian seharian, tempat kediaman dan juga berkaitan sesuatu yang berhubung dengan keperluan kehidupan harian seperti air minum, minyak masak, listrik dan sebagainya.²¹ Nafkah diwajibkan dikarenakan semata-mata adanya sebuah akad yang sah, yaitu penyerahan isteri kepada suami, dan memperbolehkan kemahuan bersenang-senang antara kedua-duanya.²²

Namun begitu bagi para ulama' telah memberikan suatu batasan berkenaan makna nafkah. Antaranya seperti yang disebutkan dalam Mu'jamul Wasith, yaitu berkenaan pemberian oleh seorang ayah kepada anaknya dan keluarganya seperti berupa keperluan makanan minuman harian, pakaian harian, tempat kediaman, dan sebagainya keperluan lain.²³ Keperluan bagi seorang anak atau tanggungan seorang ayah bermula dari saat anak tersebut dilahirkan, yang mencakupi seperti pembiayaan bidan atau doktor semasa dilahirkan, biaya obat-

²¹ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), hlm. 100.

²² Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, Cet. 3, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 212.

²³ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 425.

obatan serta rumah sakit dan termasuk juga keperluan bagi pertumbuhan perkembangan biologis anak.

Berdasarkan Kamus Undang-undang, *maintenance* (nafkah) adalah peruntukan makanan, pakaian dan lain-lain keperluan asas kehidupan.²⁴ Manakala, Kamus Hukum mendefinisikan nafkah secara umum yaitu, belanja untuk memelihara kelangsungan hidup.²⁵ Dari definisi yang telah disebutkan mengenai nafkah di mana merupakan sebuah pemenuhan keperluan kehidupan anak dalam bentuk makanan, pakaian harian dan keperluan perumahan yang wajib diberikan oleh seorang ayah untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Dalam pemenuhan kewajiban nafkah daripada seorang ayah merupakan hak daripada seorang anak. Maka dengan itu, hak dan kewajiban kepada anak tidak boleh diketepikan dan ia merupakan sebuah ikatan yang erat dan apabila salah satu pihak lalai akan mengakibatkan terputusnya akan iya sebuah ikatan.

2. Dasar Hukum Nafkah Anak

Nafkah adalah sebuah hak wajib yang terikat bagi seorang ayah kepada keluarganya, namun sifat bagi nafkah itu sendiri pelbagai kerana akan kembali kepada keperluan dan kepentingan dalam kehidupan seharian keluarga. Antara padanya nafkah boleh dilihat secara jelas adalah seperti keperluan makan dan seharian, tempat tinggal berteduh, keperluan pendidikan, obatan diperlukan, dan juga keperluan pakaian seharian meskipun pasangan mampu dalam memenuhi keperluan seharian tetapi perlu disesuaikan kemampuan keluarga serta kemampuan ayah menafkahi semampunya. Terdapat banyak dalil dan dasar kepada hukum bagi nafkah kepada anak yaitu daripada al-Qur'an, Sunnah, Ijmak Ulama' dan Enakmen 7 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Perlis Tahun 2006.

²⁴ Kamus Undang-Undang, (Selangor: Oxford Fajar Sdn. Bhd., 2007), hlm. 335.

²⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*: Edisi Baru, (Jakarta: Rineka Cipta & Bina Adiaksara, 2015), hlm. 88.

a. Al-Qur'an

Surah At-Talaq ayat 7:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا
إِلَّا مَا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.

Allah tidak akan membebankan sesuatu kepada seseorang melainkan iya adalah kemampuan itu ada padanya dalam menanganinya. Oleh itu, bagi mereka yang sedang berada dalam kesempitan perlu sentiasa ingat sesungguhnya Allah akan hadirkan kemudahan bagi keluar daripada sebuah kesusahan dan kesempitan dalam kehidupan.

b. Sunnah

Agama Islam sudah menetapkan pemberian nafkah bagi isteri dan anak hendaklah sesuai kadar *kifayah* yaitu mencukupi dan *ma'ruf* yaitu baik. Dalam sebuah hadis nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah R.A daripada kisah Hindun isteri kepada Abu Sufyan telah mengadu kepada Baginda Nabi SAW berkenaan suaminya yang bakhil sehingga tidak memberikan kepadanya serta anaknya nafkah, bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ - أَمْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النِّفْقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي
بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ نَّاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ :
خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ

Artinya : “Dari Aisyah beliau berkata:” Hindun putri „Utba isteri Abu Sufyan masuk menghadap Rasulullah SAW seraya berkata: Ya Rasulullah

sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir. Dia tidak memberikan saya nafkah yang cukup untuk saya dan anak-anakku selain apa yang saya ambil dari sebagian hartanya tanpa setahunya. Apakah saya berdosa karena perbuatanku itu? Lalu Rasul SAW. bersabda: “Ambillah olehmu sebagian dari hartanya dengan cara yang baik secukupnya untukmu dan anak-anakmu.”²⁶

Dapat dilihat berdasarkan hadis di atas jelas mengatakan nafkah itu sifatnya adalah relatif, jika nafkah padanya diletakan suatu batasan atau ukuran tertentu maka baginda Rasulullah SAW akan perintah kepada Hindun untuk turuti dan memberikan ukuran kepada nafkah sesuai perintah. Namun, pada waktu itu baginda hanya perintahkan Hindun mengambil sebahagian harta suami kepadanya sesuai kecukupan keperluan dan dengan cara yang baik mengambil. Menurut Ibnu Rusyd di dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* daripada pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah berkenaan ukuran nafkah ini banyak ataupun tidak bukan ditetapkan oleh hukum syarak, tetapi kembali berdasarkan keadaan kondisi kewangan suami isteri dan hal ini adanya kesesuaian bergantung kepada kemampuan secara peribadi si suami dan keperluan dari pada si isteri untuk keluarga.

c. Ijmak Ulama

Secara umumnya, dalam undang-undang Islam memaknai nafkah kepada apa-apa yang dibelanjakan oleh seseorang baik untuk isteri, anak-anak dan juga ahli keluarga yang mencakupi aspek seperti keperluan makanan dan pakaian seharian serta tempat tinggal berteduh.²⁷ Nafkah itu sendiri padanya telah terbahagi kepada dua jenis, yaitu wajib terhadap seseorang untuk memberikan nafkah dari pada seseorang untuk dirinya sendiri dan nafkah yang wajib atas diri sendiri diberikan kepada orang lain.²⁸ Para Fuqaha telah bersepakat dalam

²⁶ M. Nashiruddin Al-Abani, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, 1042, (Jakarta : Gema Insani, 2007), Cetakan 1, Jilid 2, hlm. 75.

²⁷ Al-Ghundur, Ahmad, *al-Ahwal al-Shakhsiyyah fi al-Tashri' al-Islami*. Edisi Keempat. Maktabah al-Fallah: Kuwait, 1413H/1992. hlm. 424

²⁸ Al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Dar al-Fikri: Beirut. Jilid 3, 1421H/2001. Hlm. 542

mengatakan bagi seorang anak adalah antara kelompok yang berhak kepada nafkah menurut aturan yang ditetapkan dalam agama Islam.²⁹

Dalam syariat Islam, ada tiga sebab yang mewajibkan kepada seseorang untuk memberikan nafkah kepada orang lain. Sebab pertama, adalah disebabkan atas pertalian darah (al-qarabah). Ulama telah bersepakat dalam menentukan kewajiban nafkah atas pertalian darah adalah daripada nafkah diberikan kepada anak dan nafkah kepada ibu bapa.³⁰ Namun begitu, bagi nafkah kepada kerabat keluarga yang lain seperti kakek, nenek, cucu dan kepada ahli yang lain. Sebab kedua diwajibkan nafkah ialah atas perkahwinan, yaitu kewajiban memberikan nafkah kepada isteri. Manakala, bagi sebab yang ketiga pula adalah atas sebab kepemilikan yaitu kewajiban memberikan nafkah kepada hamba daripada tuannya. Daripada pembagian telah menunjukkan bahawa sebab wajib kepada nafkah kepada anak adalah jelas atas dasar pertalian darah antara anak dengan ayah. Oleh itu, sudah menjadi umum apabila adanya ikatan perkahwinan seorang lelaki dan perempuan serta dikurniakan zuriat anak kepadanya baik maka kewajiban menafkahi anak tersebut adalah bersifat wajib kepada si ayah kerana mempunyai pertalian darah.³¹

d. Enakmen 7 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Perlis Tahun 2006

Federasi Malaysia telah mencapai kemerdekaan pada tanggal 31 Agustus tahun 1957 dan majoritas sebanyak 61% pada saat ini adalah Muslim beragama Islam, sebagaimana telah tertulis dalam konstitusi Malaysia pada bagian 1 pasal 3 menyatakan:

²⁹ Al-Marghinani, Burhanuddin Ali ibn Abi Bakr, *al-Hidayah Sharh Bidayat al-Mubtadi*, Dar al-Salam, Kaherah, 1420H/2000, Jilid 3, hlm. 63

³⁰ Sha'ban, Zaki al-Din, *al-Ahkam al-Shar'iyah li al-Ahwal al-Shkasiyyah*. Jami'ah Qaryunus: Banghazi, 1993. hlm. 677

³¹ Badruddin Hj Ibrahim & Azizah Mohd, *Hak Ibu Bpa Terhadap Nafkah Anak Dalam Perundangan Islam*, Kanun, Jun 2012, hlm. 34

“Islam adalah agama Federasi, tetapi agama-agama lain dapat diterima dan diperkenankan untuk prakteknya dalam kedamaian dan harmonis di setiap bahagian daripada konstitusi”³²

Ketentuan ini sangat penting bagi masyarakat beragama Islam di Malaysia, kerana pada pasal 3 tersebut menjadi sebab utama kepada tunjang kepada kekuasaan perundangan-undangan di Malaysia.

Hukum di Malaysia lebih tertumpu kepada perkara berkaitan bagi masalah pengabaian kepada nafkah, hak anak, perceraian atau tuntutan hak dalam perkahwinan. Bagi ketentuan tersebut telah ditetapkan terkait perihal hak pemberian nafkah selepas daripada perceraian telah diatur dalam Enakmen 7 Undang-undang Keluarga Islam Seksyen 73 Tahun 2006 yaitu:³³

- 1) “Kewajipan bagi si suami dalam menanggung hak nafkah anaknya, walaupun anak itu sama ada berada dalam jagaanya atau jagaan orang lain tetap perlu menyediakan kelengkapan kepada anaknya itu dengan tempat tinggal, pakaian, makanan, perubatan dan pelajaran sebagaimana yang munasabah memandang kepada kemampuan dan taraf kehidupannya atau dengan membayar kosnya. Melainkan jika ada sesuatu perjanjian ataupun suatu perintah daripada Mahkamah yang telah menetapkan maka harus tertakluk kepada ketetapan daripada keputusan Mahkamah.”
- 2) “Jika ayah kepada anak tersebut telah meninggal dunia atau tempat bapanya berada tidak diketahui atau jika dan setakat mana bapanya tidak berupaya menanggung nafkah anaknya itu, maka adalah menjadi suatu kewajipan seseorang daripada keluarga yang berdekatan dengan anak itu akan menjadi penjaga sesuai dengan ketetapan di bawah Hukum Syarak.”

Seperti apa yang termaktub sesuai perundangan-undang ini di Perlis, anak akan mendapat perlindungan dan hak terhadap pemberian nafkah bagi kasus pasca perceraian. Daripada aturan ini, membolehkan ruang dan cara tuntutan hak nafkah anak dapat dituntut kepada si ayah atau wali terdekatnya sehingga anak tersebut mencapai usia maksimal sebelum melangkah ke usia dewasa. Ketentuan ini juga, sebuah jaminan kepada kepastian hukum agar tidak adanya sebarang pengabaian atau perlecehan terhadap anak. Maka inilah peranan dan fungsi

³² Constitution of Malaysia, Part I: *The States, Religion And Law of Federation*, Article Number 3 point 1

³³ Seksyen 73 (1) dan (2), Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Perlis) 2006

kepada Mahkamah Syariah bagi memastikan hak dan kepentingan individu dijaga dan dipertahankan, agar tidak dicabuli. Selain itu, hak dan kepentingan individu diselaraskan untuk mengelakkan percanggahan serta diselesaikan secara adil.³⁴

B. Nafkah Anak Pasca Perceraian

Nafkah kepada anak merupakan suatu nafkah yang wajib diberikan ke atas seseorang bagi menanggung anaknya, sama ada anak tersebut adalah di bawah jagaanya sendiri atau di bawah jagaan seseorang yang lain. Nafkah anak ini termasuklah makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perubatan dan perkara-perkara lain sesuai ukuran kemampuan dalam menafkahi. Dari pada sesuatu masalah yang perlu kepada penyelesaian akibat perceraian adalah pemenuhan nafkah kepada anak. Kewajiban dalam menafkahi anak terikat bersama apabila sah sebuah ikatan perkahwinan walaupun pasca perceraian. Yakni wali, si ayah dan si ibu wajib untuk memelihara serta memberikan pendidikan meskipun status sudah berubah tidak lagi bersama. Hukum Islam hanya menetapkan kadar tahun bila anak tersebut sudah baligh, selama status anak tersebut tidak mencapai umur baligh maka anak tersebut perlu mendapat perhatian dari wali serta kedua-dua si ayah dan si ibu.

Pada pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan beberapa akibat hukum putusanya perkawinan, yakni:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anakanaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan putusannya.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

³⁴ Mahmud Saedon A. Othman, 1998, *Institusi Pentadbiran Undang-undang & Kehakiman Islam*, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa & Pustaka, hlm. 27

- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.³⁵

Pasal 41 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan dimana pada hakikatnya kewajiban dalam memberikan nafkah adalah daripada bapak. Bapak bertanggung jawab kepada anak sampai anak tersebut berusia 21 tahun. Dasar dalam pemberian nafkah diatur dalam Surat Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

Namun dalam persoalan nafkah pasca perceraian sering terjadi masalah setelah bercerai ayah cenderung mengabaikannya terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok anak yaitu keperluan harian, pendidikan serta sarana keperluan lainnya. Hal ini juga yang akan menimbulkan kesan buruk bagi seorang anak jika tidak terpenuhi.

Menurut Imam Malik dalam pemberian nafkah kepada anak hanya bagi yang berkewajiban memberi nafkah kepada orang tua dan anak kandung. Manakala, menurut Imam Syafie seorang anak dibebani dengan kewajiban memberi nafkah kepada bapak atau kakeknya dan seterusnya ke atas atau ke bawah (konsep awlad aba' atau furu' dan usul).³⁶

Menurut Abu Zahra³⁷ sebagaimana pendapat oleh Imam Syafie dalam uraian yang lebih jauh, bahwa seorang individu atau tepatnya seorang anak yang

³⁵ Perkahwinan & Kompilasi Hukum Islam, Cetakan 9, (Bandung: Citra Umbara, November 2017), hlm. 14

³⁶ Udin Safala, *Nafkah Anak Pasca Perceraian dan Kerabat Menurut Abu Zahra dan Implikasinya Bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia*, (Jogja : Stain Press Ponorogo) hlm. 91

³⁷ Ibid, hlm, 92

telah berusia dewasa dan memiliki kemampuan finansial yang berlebihan atau sudah sejahtera dibebani kewajiban untuk memberi nafkah kepada bapak atau kakeknya dan seterusnya menurut genealogi ke atas, hal yang sama juga berlaku untuk geonologi ke bawah dalam arti bahwa seseorang bapak wajib memberi nafkah kepada anaknya, atau jika iya sudah menjadi seorang kakek iya juga diberi beban untuk memberikan nafkah kepada cucunya dan seterusnya dalam jalur geonologi lelaki ke bawah.

Dalam Undang-undang Keluarga Islam di negeri Perlis, Malaysia³⁸ bagi penaksiran nafkah isteri dan anak menjelaskan bahwa;

“Pada menentukan jumlah sesuatu nafkah yang hendak dibayar, Mahkamah hendaklah menegaskan pentaksirannya terutama sekali atas kemampuan dan keperluan pihak-pihak itu, dengan mengira kadar nafkah itu berbanding dengan pendapatan orang yang terhadapnya perintah itu dibuat”

Dalam peruntukan tersebut bersifat umum dan tidak menjelaskan secara terperinci dengan apakah yang dimaksudkan kemampuan suami atau wali ke atas keperluan nafkah bagi isteri dan anak. Keputusan pada Hakim dalam memutuskan keputusan atas tuntutan nafkah isteri dan anak dengan menimbang beberapa faktor mengikut budi bicaranya bagi menetapkan suatu kadar kepada nafkah isteri dan anak.³⁹ Daripada peruntukan yang terlalu umum yang mengakibatkan ketidakjelasan, maka pertimbangan kepada beberapa faktor yang digunakan oleh Hakim adanya kesukaran dalam menentukan kadar nafkah kepada isteri atau anak.

Oleh yang demikian, satu keperluan dalam mengetahui maksud kepada *kifayah* dan *ma'ruf* bagi penentuan kadar nafkah buat isteri dan anak. Dalam konteks ini, pandangan dan huraian para fuqaha berkenaan *kifayah* dan *ma'ruf* perlu kepada penelitian dan dikaji dalam maslahat penentuan kadar nafkah

³⁸ Lihat Seksyen 62, di bawah tajuk ‘Pentaksiran Nafkah’, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Perlis) Tahun 2006.

³⁹ Zaharah Jaafar, ‘Penetapan Kadar Nafkah Isteri: Satu Kajian di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan’, (Disertasi Sarjana, Akademik Pengajian Islam Universitas Malaya, 2005), hlm. 193

kepada isteri atau anak. Bagi mendapatkan sebuah kesimpulan yang sesuai untuk diaplikasikan di Malaysia, rujukan perlu dibuat dalam menimbang kondisi ekonomi semasa dan realiti masyarakat pada masa kini juga perlu diperhatikan dengan tidak mengetepikan keputusan-keputusan yang pernah dibuat oleh Hakim Mahkamah Syariah⁴⁰.

Dalam pembahasan fiqh kasik, para fuqaha terdapat beberapa penafsiran yang berbeda mengenai *kifayah* nafkah. Qaul daripada Imam Hanafi, yaitu *Musili* menghuraikan bahawa kadar *kifayah* tidak dapat diukur dengan nilai mata wang baik dinar ataupun dirham, namun hanya beberapa kadar yang sesuai dan mencukupi untuk isteri. Iya juga dipersetujui dari pada Sheikh *Nazzam* dan juga daripada beberapa ulama lain dalam kitab *al-Fatawa al-Hindiyyah*.⁴¹ Namun, ada beberapa yang menakrifkan *kifayah* sebagai suatu boleh memperhitungkan kepada bentuk dirham dan juga boleh secara tunai kadar tertentu bagi setiap bulan dalam pemberian nafkah.⁴²

Seterusnya bagi menghuraikan pengertian *ma'ruf* dari para fuqaha *shafi'iyyah* dalam memberi pendapat nafkah kepada isteri atau anak perlu kepada ketetapan tertentu, kerana *ma'ruf* tanpa kadar tertentu akan membawa kepada beberapa persoalan yang akan berpanjangan.⁴³ Para fuqaha Shafi'i⁴⁴, dalam menetapkan kadar nafkah yang perlu diberikan oleh suami yang berkemampuan lebih kepada isterinya ialah 2 *mud* (1 cupak) untuk kegunaan harian. Berbeda pula bagi suami yang tidak berkemampuan cukup sekadar 1 *mud* dan bagi suami yang mampu ialah pada kadar 1 setengah *mud*; yaitu sesuai kadar sepertimana

⁴⁰ Raihanah Azahari, Bahiyah Ahmad & Asmak Ab Rahman, 2012, Penentuan Kadar Kifayah dan Ma'ruf Nafkah Anak dan Isteri: Kajian Terhadap Penghakiman Mahkamah Syariah, *Jurnal Syariah Jilid 20 No. 2*, hlm. 147

⁴¹ Al-Nazzam, *al-Fatawa al-Hindiyyah fi Madhhab Imam Abi Hanifah* (Dar al- Fikr, Jilid 4, 1411H/1991M), hlm. 237

⁴² Ibrahim bin Abi al-Yaman Muhammad al-Hanafi, *Lisan al-Hukkam fi Ma'rifah al-Ahkam* (Kaherah: al-Bab al-Halabi, Jilid 1, 1393H/1973M), hlm. 355

⁴³ Al-Mawardi, *al-Hawi fi Fiqh al-Shafi'iyy* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Jilid 11, 1414H/1994M), hlm. 425

⁴⁴ Al-Nawawi, *al-Majmu'* (Beirut: Dar al-Fikr, Jilid 18), hlm. 250

hukum bagi pembayaran *kaffarah*. Para fuqaha Malikiyyah dan Ibnu Qadamah pula dalam mentakrifkan *ma' ruf* pada nafkah isteri atau anak tidak ada pada suatu ketetapan kadar, tetapi berpandukan kepada *kifayyah* (kecukupan) buat nafkah kepada isteri atau anak. Menurut beliau meletakkan kewajiban sesuatu yang mengurangi *kifayyah* adalah merupakan perbuat yang akan mengurangi *ma' ruf* dan sekiranya iya memenuhi tuntutan *kifayyah* walaupun kurang daripada 1 *mud*, maka iya juga perkara yang termasuk sesuai dengan tuntutan al-Qur'an dan As-Sunnah⁴⁵. Manakala, dalam kalangan fuqaha Shafi'i lain yaitu Mustafa al-Khin, Mustafa al-Bugha dan juga Ali al-Sharbaji turut menjelaskan bagi kadar kecukupan ukuran kepada *kifayyah* haruslah berlandaskan pandangan semasa dan kebiasaan masyarakat setempat serta kadar semasa kebiasaan yang ditentukan⁴⁶.

Wahbah al-Zuhaili bersetuju sejalan dengan pandangan daripada para fuqaha al-Shafi'i asas kepada penentuan kadar nafkah dilihat berdasarkan keadaan suami tetapi, beliau tidak mempersetujui bagi penggunaan *kaffarah* dalam qiyas kepada kadar nafkah isteri. Perbahasan kepada mengenai nafkah anak menyaksikan semua ulama mazhab sepakat dalam penentuan kadar nafkah anak berdasarkan *kifayyah* atau kecukupan.

C. Macam-macam Nafkah Anak Pasca Perceraian

Terdapat beberapa faktor yang perlu diperkiran oleh para Hakim Mahkamah Syariah dalam memutuskan putusan hukum bagi kasus yang berkaitan tuntutan nafkah bagi isteri dan juga anak. Berdasarkan pandangan para sarjana Islam serta faktor-faktor yang selalu menjadi pertimbangan para Hakim, dalam menentukan kadar bagi *ma' aruf* dan *kifayah* untuk nafkah isteri dan anak:-

⁴⁵ 'Abd Allah bin Ahmad Ibn Qudamah, *al-Mughni fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal* (Beirut: Dar al-Fikr, Jilid 9) 1404H/1984M, hlm. 231

⁴⁶ Mustafa al-Khin, Mustafa al-Bugha & 'Ali al-Sharbaji, *al-Fiqh al-Manhaji* (Damsiyq: Matba'ah al-Sabah, Jilid 4, 2005), hlm. 359



Table 4: Pandangan Para Fuqaha Tentang Penentuan Kadar *Kifayah* Nafkah dan *Ma'aruf* Serta Aplikasinya di Malaysia

1) Kemampuan Pemberi Nafkah Dan Keperluan Pihak-Pihak

Kemampuan pembiaya nafkah dan keperluan pihak-pihak menuntut menjadi elemen yang sangat penting bagi hakim-hakim dalam mempertimbangkan permohonan nafkah isteri atau anak. Begitu juga sebaliknya jika orang yang diperintah membayar nafkah itu berlaku keatasnya perubahan tentang hal keadaan seperti kesempitan hidup dan sebagainya. Maka, Hakim

Mahkamah Rayuan Syariah boleh perintah anak yang berada di bawah asuhan ibunya memerlukan pengawasan, asuhan, makan minum dan pakaian yang secukupnya yang mana ini semua memerlukan perbelanjaan dan nafkah yang wajib dibiayai dan ditanggung oleh ayah anak tersebut. Hakim perlu jelas untuk melihat kepada kemampuan pemberi nafkah yaitu ayah dan keperluan pihak-pihak penerima yaitu anak-anak dalam menentukan kadar nafkah. Namun demikian, apakah yang dimaksudkan sebagai kemampuan pemberi nafkah tidak dinyatakan secara jelas dalam penghakiman ini. Begitu pun, Yang Arif Hakim telah menjelaskan bahawa aspek pengawasan, penjagaan dan pemakanan serta pakaian yang secukupnya menjadi pertimbangan kenapa kadar sedemikian diputuskan.⁴⁷

2) Kemampuan Pemberi Nafkah (Suami/Ayah)

Meskipun dalam memutuskan kadar nafkah yang berhak diterima oleh isteri dan anak, hakim melihat kepada kemampuan dan keperluan pihak-pihak, tetapi dalam banyak hal pertimbangan yang serius diberi kepada aspek kemampuan suami atau bapa. Ia merangkumi jumlah pendapatan bulannya, perbelanjaannya sama ada perbelanjaan wajib mahu pun keperluan hariannya, jumlah tanggungannya dan apa juga yang berkait dengan kewangan si suami/bapa.⁴⁸ Ketika Hakim memutuskan kes, Hakim akan merujuk dan berpandu kepada firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 223, surah al-Talaq ayat 7 dan hadis Hindun isteri kepada Abu Sufyan serta Seksyen 73 (1) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Perlis yang memperuntukan;

Kecuali jika sesuatu perjanjian atau suatu perintah Mahkamah memperuntukan selainnya, maka adalah menjadi kewajipan seseorang lelaki menanggung nafkah anaknya, sama ada anak itu berada di dalam jagaannya atau dalam jagaan seseorang lain, sama ada dengan mengadakan bagi mereka tempat tinggal, pakaian, makanan, perubatan dan pelajaran

⁴⁷ Raihanah Azahari, Bahiyah Ahmad & Asmak Ab Rahman, 2012, Penentuan Kadar Kifayah dan Ma'ruf Nafkah Anak dan Isteri: Kajian Terhadap Penghakiman Mahkamah Syariah, *Jurnal Syariah Jilid 20 No. 2*, hlm. 152

⁴⁸ Ibid.

sebagaimana yang munasabah memandang kepada kemampuan dan taraf kehidupannya atau dengan membayar kosnya.

Yang Amat Arif (YAA) seterusnya menjelaskan bahawa ukuran untuk menentukan kadar nafkah anak mengikut seksyen tersebut adalah ukuran munasabah berdasarkan kemampuan dan taraf kehidupan ayah. Dengan kata lain jika ayah seorang miskin atau sederhana, maka kadar yang boleh dituntut hendaklah meliputi makan minum, pakaian, tempat tinggal, persekolahan dan perubatan yang sekadar sahaja kecuali ayah itu seorang yang kaya.

Menurut YAA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dalam beberapa kasus kemampuan pemberi nafkah plaintif tidak mengemukakan sebarang bukti tentang kemampuan keuangan Defendan yaitu bapa, plaintif hanya menyatakan bahawa defendan seorang persara perkhidmatan kerajaan dan mempunyai sebuah rumah dan ada pekerjaan baru⁴⁹. Oleh yang demikian mahkamah hanya akan memutuskan sesuai apa yang diakui oleh defendan. Bahkan defendan dalam keadaan ini mengikut pandangan syarak wajib bekerja. Oleh yang demikian mahkamah berpendapat tuntutan penggugat terhadap nafkah anaknya adalah munasabah dan wajar diluluskan. Meskipun meluluskan tuntutan penggugat terhadap nafkah anaknya mahkamah bagaimanapun menolak tuntutan penggugat terhadap tunggakan nafkah anak tersebut dengan alasan yang penggugat telah berjanji semasa memohon perceraian, bahawa beliau tidak akan menuntut apa-apa termasuklah nafkah anak. Walaupun menjelaskan bahawa mahkamah berhak mengubah perjanjian yang dibuat terdahulu berkenaan dengan perintah nafkah anak, namun YAA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah mengekalkan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya.

3) Keperluan Istri dan Anak

⁴⁹ *Jurnal Hukum* XV1 Bhg 11 (2003), 101 – 116. Rujuk juga kes *Hj Ghazali lwn Asmah*, *Jurnal Hukum* (1985), 55 kes *Wan Azmi lwn Nik Salwani* 1 *Jurnal Hukum* (2)(1977), 81 dan kes *Rasnah Arifin lwn Shafri Khalid* (Kes Mal No.03-125/2000) Mahkamah Rendah Syariah Butterworth, Pulau Pinang.

Bagi menentukan kadar nafkah yang munasabah, mahkamah telah merujuk kepada seksyen 62 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Perlis) 2006 yang memperuntukkan:

Pada menentukan jumlah sesuatu nafkah yang hendak dibayar, Mahkamah hendaklah mengasaskan pentaksirannya terutama sekali atas kemampuan dan keperluan pihak-pihak itu, dengan mengira kadar nafkah itu berbanding dengan pendapatan orangnya terhadap perintah itu dibuat.

Dalam soal keperluan Isteri dan Anak, Hakim Mahkamah Rayuan Syariah akan membenarkan naik banding dengan berasaskan keperluan bagi nafkah perayu dan anaknya. Hakim Mahkamah Rayuan berhujah bahawa perayu telah menyenaraikan tanggungannya dan juga keperluan anak tersebut. Hakim Rayuan bersetuju bahawa sebahagian dari tanggungan yang dinyatakan bukanlah keperluan utama bagi nafkah isteri dan anak. Begitu pun, mahkamah berpendapat bahawa kegagalan perayu untuk memperincikan perbelanjaan sebenar nafkah dengan mengemukakan bukti-bukti berhubung dengan perbelanjaan perayu dan anak bukanlah satu halangan kepada mahkamah untuk menetapkan bayaran nafkah yang sewajarnya.

Berdasarkan dari pada contoh kasus⁵⁰ bersama bukti-bukti yang dikemukakan oleh perayu, mahkamah mendapati bahawa responden adalah seorang yang mempunyai pendapatan tetap dan pendapatan kasar sebanyak RM4000 dan setelah ditolak potongan Employee Provident Fund (EPF), Social Security Organisation (SOCSO) dan Potongan Cukai Bulanan (PCB) maka gaji bersih responden ialah sebanyak RM3471.25. Berdasarkan jumlah ini mahkamah berpendapat bahawa pendapatan responden adalah sederhana. Oleh itu dengan memperhitungkan keperluan asas bagi nafkah perayu dan anaknya mahkamah berpendapat bahawa nafkah yang selayaknya bagi perayu adalah lebih kurang 20% dari gaji bersih responden manakala untuk anak adalah lebih kurang

⁵⁰ *Jurnal Hukum* 30 Bhg 1, (1431/2010), 111. Rujuk juga kes *Khatija A/P Yusoff dan Shaik Abdul Kadir bin Kadar Bacha* (kes Mal 695/1997 MRSWP, kes yang tidak dilaporkan).

sebanyak 10%. Oleh yang demikian setelah digenapkan mahkamah berpendapat bahawa nafkah diri perayu ialah sebanyak RM700 sebulan manakala nafkah anak adalah sebanyak RM300 sebulan. Mahkamah juga berpendapat bahawa nafkah yang tidak ditunaikan sebelum ini adalah menjadi hutang ke atas responden dan iya wajib ditunaikan.

Secara jelasnya kasus ini menunjukkan bahawa hakim telah melihat keperluan pihak-pihak iaitu isteri dan anak adalah faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan nafkah yang wajib dibayar oleh suami, sehinggakan dalam keadaan di mana isteri tidak memperincikan keperluannya hakim hendaklah menggunakan budi bicaranya untuk menentukan kadar yang sepatutnya dibayar.

4) Perbelanjaan yang Mengikut Keperluan dan Keutamaan

Dalam perbelanjaan mengikut kesesuaian kepada keperluan dan keutamaan untuk nafkah, memerlukan kepada penilaian sesuai dengan kehendak serta disesuaikan dengan kemampuan pemberi nafkah. Seperti dalam suatu kasus daripada penggugat,⁵¹ telah menuntut perubahan terhadap nafkah yang telah diperintahkan oleh mahkamah dalam tuntutan hadanah dan nafkah anak yang telah dibicarakan sebelum ini kerana kos perbelanjaan anak-anak telah meningkat dan memerlukan penambahan. Penggugat telah memperincikan keperluan kepada perbelanjaan yang dikeluarkan yang merangkumi belanja harian, keperluan sekolah, rawatan perubatan, kelas pengajian Kelas Al-Quran & Fardhu Ain (KAFA), buku tambahan keperluan sekolah, makan minum, pembayaran tambang sekolah, pembayaran penjagaan anak-anak, makanan ringan dan pengajian al-Quran.

Maka keputusan mahkamah bagi memutuskan terkait perubahan dalam keperluan perbelanjaan nafkah anak-anak dan bagi terdakwa (ayah) membayar nafkah kepada anaknya dalam sebulan, perbelanjaan awal sekolah anak-anak dan

⁵¹ *Jurnal Hukum* 27 Bhg II (1430/2009), hlm. 279-301

perbelanjaan serta persiapan hari raya dalam tahun tersebut. Hakim menjelaskan bahawa mahkamah berpuas hati mengenai ketidakmampuan terdakwa (ayah) untuk menanggung penambahan nafkah yang diminta oleh plaintif. Oleh yang demikian mahkamah perlu merujuk pula kepada perbelanjaan-perbelanjaan yang menjadi keperluan kepada anak-anak tersebut. Dengan demikian mahkamah menolak tuntutan penggugat terhadap perbelanjaan rawatan perubatan kerana penggugat tidak menunjukkan secara jelas apakah perbelanjaan itu sesuatu yang perlu pada setiap bulan dan juga tidak pernah dibuktikan bahawa anak tersebut menghidap penyakit yang serius sehingga memerlukan perbelanjaan pada setiap bulan. Mahkamah juga menolak permohonan penggugat untuk perbelanjaan pembelian jajan (makanan ringan) bulanan kerana sangsi terhadap keperluannya.

5) Kelas Sosial Isteri Serta Kelas Sosial Suami dan Isteri (mengikut kelaziman dan adat sesuatu tempat)

Dalam institusi kehakiman, Hakim dalam membuat keputusan telah menjelaskan bahawa kadar nafkah iddah yang berhak ke atas isteri selama tempoh si isteri menjalani iddah diukur mengikut kedudukan atas nisbah kaya, miskin dan pertengahan. Pemakanan mengikut ikhtiar adat kebiasaan bagi kelaziman orang Melayu makan hariannya iyalah dua kali ringan dan dua kali berat. Dalam hal ini hakim nampaknya telah mempertimbangkan kadar nafkah isteri menurut kelas sosial masyarakatnya dengan memutuskan bahawa suami dikehendaki membayar nafkah iddah.

Begitu juga Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Pulau Pinang,⁵² telah merujuk kepada kelas sosial suami dan isteri bagi menentukan kadar nafkah iddah yang patut diterima sepatutnya oleh isteri serta dalam penentuan nafkah kepada anak. Pemohonan daripada penggugat selama tuntutan iddah iaitu pada pandangannya itulah yang dibelanjakan selama kehidupan suami isteri dulu yang

⁵² Suwaid Tapah, 'Nafkah Isteri', dalam Abdul Munir & Siti Shamisiah Md Supi (eds.), *Manual Undang-undang Keluarga Islam* (Kuala Lumpur: Institusi Kefahaman Islam Malaysia 2006), hlm. 47

termasuk apa-apa keperluan diri penggugat, makanan, pakaian, alat solek dan perkara yang beliau perlukan semasa hidup sebagai suami isteri. Mahkamah menilai berdasarkan taraf kehidupan pasangan yang berpendapatan sederhana dan oleh yang demikian nafkah iddah yang terhak atas isteri juga adalah dalam kadar sederhana untuk menjaga kebajikan isteri yang diceraikan yang tidak mempunyai tempat untuk bergantung nafkah bagi dirinya.

Berdasarkan kaedah fiqh, لا يكرتغير الأحكام بتغير الأزمان (Tidak diingkari perubahan hukum dengan sebab berlakunya perubahan masa) boleh dijadikan asas dalam penilaian komponen penentuan kadar *kifayah* dan *ma'ruf* nafkah anak dan isteri yang sesuai diaplikasi dalam konteks semasa. Ini kerana مقاصد الشريعة (objektif syariah) adalah bertujuan menjaga lima perkara utama iaitu akal, agama, nyawa, harta dan keturunan. Sekiranya hakim menetapkan kadar nafkah yang perlu diberi oleh suami kepada isteri dan anak-anak tanpa mengambil kira objektif syariah, dikhawatirkan ia boleh membawa kepada kemudharatan kepada akal, agama, nyawa, harta dan keturunan keluarganya.⁵³ Contohnya untuk menjaga nyawa seseorang perlu mendapat makanan yang mencukupi untuk kelangsungan hidup. Sekiranya nafkah yang diberi terlalu sedikit dan tidak mencukupi untuk perbelanjaan makanan yang berkhasiat maka ia akan menjejaskan kesihatan isteri dan anak yang boleh membawa kepada pengabaian penjagaan nyawa untuk tempoh yang panjang.

Dengan demikian, dalam menentukan kadar nafkah yang mengambil kira kemampuan suami dan keperluan isteri dan anak, perlulah melihat kepada realiti semasa apakah yang dimaksudkan keperluan isteri dan anak-anak. Ini kerana, pemberian nafkah tanpa mengambil kira kesemua faktor tersebut tidak mencapai

⁵³ Raihanah Azahari, Bahiyah Ahmad & Asmak Ab Rahman, 2012, Penentuan Kadar Kifayah dan Ma'ruf Nafkah Anak dan Isteri: Kajian Terhadap Penghakiman Mahkamah Syariah, *Jurnal Syariah Jilid 20 No. 2*, hlm. 158

maqasid pemberian nafkah. Pada hakikatnya keperluan isteri dan anak-anak boleh dibahagikan kepada tiga keperluan utama iaitu⁵⁴ :



Table 5: Hierarki Keperluan Isteri dan Anak

Jika dilihat kepada keperluan *daruriyyat* yang merupakan keperluan asas kepada kelangsungan kehidupan, maka suami perlu memberikan nafkah berdasarkan keperluan *daruriyyat* tersebut. Sekiranya pemberian nafkah tidak dapat memenuhi keperluan *daruriyyat* isteri dan anak-anak, ini akan menyebabkan isteri terpaksa mencari sumber rezekinya sendiri. Dalam kasus di mana isteri mendapat hak penjagaan anak-anak dan suami pula memberikan nafkah pada kadar yang sangat minima sehingga tidak dapat memenuhi keperluan *daruriyyat* anak-anak, maka suami telah meletakkan anak-anak dalam keadaan yang bahaya kerana anak-anak mungkin akan terjebak dengan gejala sosial seperti mencuri, mengemis dan sebagainya bagi mendapat wang untuk memenuhi

⁵⁴ Raihanah Azahari, Bahiyah Ahmad & Asmak Ab Rahman, 2012, Penentuan Kadar Kifayah dan Ma'ruf Nafkah Anak dan Isteri: Kajian Terhadap Penghakiman Mahkamah Syariah, *Jurnal Syariah Jilid 20 No. 2*, hlm. 159

keperluan hidup mereka. Contohnya jika seorang suami perlu memberikan nafkah kepada tiga orang anaknya maka perkara yang perlu diambil kira adalah seperti berikut:⁵⁵

Perkara	Kadar Bayaran (RM)	Jumlah Sebulan (RM)
Makanan	RM 5 X 30 Hari X 3 Orang	450.00
Tempat Tinggal	Sewa Rumah	500.00
Pendidikan		
Yuran (tahunan)	RM 20	
Duit Belanja Sekolah	RM 1 X 20 Hari X 30 Orang	200.00
Bas Sekolah	RM 40 X 3 Orang	
Bil Air dan Elektirk		50.00
Jumlah Nafkah Sebulan		1200.00

Table 6: Kadar Nafkah yang Mengambil Kira Keperluan *Daruriyyat*

Oleh itu bagi suami yang berpendapatan tinggi, maka mereka perlu melunaskan kadar nafkah kepada isteri dan anak-anak mengikut kadar yang telah ditetapkan. Manakala bagi kes di mana suami berpendapatan rendah dan benar-benar tidak mampu menyediakan kadar nafkah sebanyak yang diperlukan untuk memenuhi *daruriyyat* isteri dan anak-anak maka tanggung jawab tersebut tidak boleh dilepaskan begitu sahaja. Dalam hal ini suami perlu berusaha secara lebih kuat untuk menampung keperluan tersebut dan mungkin satu mekanisme perlu dilakukan oleh pemerintah dengan memperuntukkan bahagian dari baitulmal sebagai satu dana yang khusus untuk membantu pemberian nafkah kepada anak-anak yang tidak mendapat nafkah yang sewajarnya dari bapa mereka. Maka secara langsung dapat membantu kelangsungan hidup anak-anak yang tidak mendapat cukup nafkah, mengelakkan isteri-isteri terjebak dengan pekerjaan

⁵⁵ Raihanah Azahari, Bahiyah Ahmad & Asmak Ab Rahman, 2012, Penentuan Kadar Kifayah dan Ma'ruf Nafkah Anak dan Isteri: Kajian Terhadap Penghakiman Mahkamah Syariah, *Jurnal Syariah Jilid 20 No. 2*, hlm. 160

yang haram seterusnya mengelakkan anak-anak terjebak dengan aktiviti-aktiviti yang tidak sihat.

D. Penegasan Tuntutan Nafkah dalam Islam

Nafkah secara syar'ī membawa maksud mencukupi kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya dengan cara baik, mencakupi makanan, pakaian, tempat tinggal, dan hal-hal lain yang mengikutinya.⁵⁶ Prinsip yang ditetapkan dalam undang-undang Islam berkenaan dengan nafkah ialah seseorang yang memiliki harta dan mempunyai kemampuan untuk menyediakan nafkah hendaklah menyediakan nafkah tersebut dengan membelanjakan hartanya sendiri. Seseorang itu tidak layak menerima nafkah yang diberikan oleh seseorang yang lain hatta daripada bapa atau anaknya melainkan dalam situasi seorang isteri yang wajib diberikan nafkah oleh suaminya.⁵⁷

Secara umumnya, kelayakan seseorang termasuklah anak terhadap nafkah di bawah undang-undang Islam berdasarkan keperluan, kecuali bagi kes seorang isteri. Isteri secara mutlak berhak terhadap nafkah tanpa mengira sama ada dirinya miskin ataupun sebaliknya, yaitu seorang yang kaya-raya. Hal ini demikian kerana kelayakan isteri terhadap nafkah bukan disebabkan keperluan tetapi kedudukannya yang berada di bawah tanggungan suaminya.

Pada dasarnya, ulama sepakat mengatakan bahawa anak yang berhak memperoleh nafkah terdiri daripada anak yang tidak mempunyai harta untuk menanggung diri mereka sendiri dan juga tidak mampu untuk mencari sumber pendapatan bagi menyara kehidupannya.⁵⁸ Berdasarkan kedua-dua syarat penting ini, ulama bersepakat bahawa anak, sama ada lelaki atau perempuan,

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemah o Nor Hasanuddin dkk, (Jakarta:Pena Pundi Aksara,2007) Cetakan ke-2, hlm.58

⁵⁷ Badruddin Hj Ibrahim & Azizah Mohd, *Hak Anak Terhadap Nafkah Dalam Perundangan Islam: Sejauh Manakah Bapa Bertanggungjawab Menanggung Nafkah Anaknya*, (Selangor: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Disember 2013), hlm. 258

⁵⁸ Al-Zarkashi, Sham s al-Din Muhammad ibn Abdullah, *Sharh al-Zarkshi ala Mukhtasar al-Khiraqi*, Maktabah al-'Ubaykan, Riyadh, 1413/1993, Jilid 6, hlm. 11.

berhak memperoleh nafkah secara mutlak sekiranya mereka tidak mempunyai harta. Dalam situasi sedemikian, mereka amat memerlukan sokongan untuk meneruskan kehidupan dan tentunya tidak mampu untuk menyara kehidupan mereka sendiri.

Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984⁵⁹ tidak meletakkan apa-apa syarat bagi anak untuk memperoleh nafkah. Walau bagaimanapun di Malaysia,⁶⁰ dalam pemberian hak nafkah terhadap anak mahkamah akan mengambil kira syarat yang telah dinyatakan. Seperti dalam satu kasus, mahkamah dalam kes ini telah menyebut keadaan yang membolehkan anak berhak mendapat nafkah iaitu apabila mereka tidak mempunyai harta dan tidak mampu untuk memperoleh pendapatan dan miskin serta tidak berkeupayaan menanggung diri mereka sendiri. Mahkamah juga menekankan bahawa individu yang dianggap tidak berupaya termasuklah anak kecil atau anak yang berada di bawah umur baligh dan anak gadis yang belum berkahwin serta anak yang masih belajar.

Bagi tempoh anak berhak dalam menerima nafkah,⁶¹ Ulama tidak mencapai kata sepakat berhubung dengan tempoh anak berhak memperoleh nafkah. Ulama Mazhab Hanafi dan Maliki membezakan antara anak lelaki dengan anak perempuan. Bagi anak perempuan, kedua-dua mazhab bersetuju bahawa hak anak perempuan terhadap nafkah berakhir apabila dia telah berkahwin disebabkan secara kebiasaan mereka tidak mampu menyara kehidupan. Walau bagaimanapun, ulama kedua-dua mazhab berbeza pandangan tentang tempoh perolehan nafkah oleh anak lelaki. Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahawa anak lelaki berhak memperoleh nafkah sehingga mencapai

⁵⁹ Akta 303 Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984

⁶⁰ Badruddin Hj Ibrahim & Azizah Mohd, *Hak Anak Terhadap Nafkah Dalam Perundangan Islam: Sejauh Manakah Bapa Bertanggungjawab Menanggung Nafkah Anaknya*, (Selangor: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Disember 2013), hlm. 259

⁶¹ Ibn al-Humam, Kamal al-Din Muhammad ibn Abd al-Wahid al-Siwasi, *Sharh Fath al-Qadir*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 1995/1415, Jilid 4, hlm. 371

umur yang membolehkannya bekerja sekalipun ia masih belum mencapai umur baligh. Namun demikian, mereka tidak menetapkan tahap umur tertentu sebagai umur bekerja. Mazhab Maliki berpendapat bahawa hak anak lelaki terhadap nafkah akan tamat apabila ia telah mencapai umur akil baligh, iaitu 18 tahun. Sementara itu, ulama Mazhab Shafii tidak membezakan antara anak lelaki dengan anak perempuan. Hak mereka untuk mendapatkan nafkah akan tamat apabila mereka mencapai usia baligh, iaitu 15 tahun disebabkan tidak ada perbezaan antara anak lelaki dan anak perempuan dalam takat keupayaan mereka untuk bekerja atau menyara hidup. Ulama Mazhab Hanbali juga tidak menetapkan sebarang tempoh khusus bagi berakhirnya kelayakan anak-anak untuk mendapatkan nafkah. Mereka berhak mendapatkan nafkah selagi mereka miskin dan tidak memiliki pendapatan.

Oleh yang demikian, berdasarkan pandangan majoriti ulama dan dengan mengambil kira interpretasi mereka yang berbeza tentang umur baligh, apabila anak telah mencapai umur baligh, atau mencapai umur bekerja, maka mereka sudah tidak layak lagi menerima nafkah. Hukum ini terpakai kepada anak lelaki menurut Mazhab Hanafi dan Maliki; dan kedua-dua anak lelaki dan perempuan menurut Mazhab Shafii. Walau bagaimanapun, ketiga-tiga mazhab sepakat bahawa anak yang telah dewasa juga berhak mendapatkan nafkah sekiranya mereka tidak berkeupayaan untuk bekerja yang disebabkan penyakit kronik, atau kecacatan mental atau fizikal.⁶² Hal ini demikian kerana keadaan ini menghalang mereka daripada bekerja dan mereka amat memerlukan sokongan serta bantuan daripada orang lain. Walau bagaimanapun, kecacatan fizikal bukanlah penghalang utama untuk mencari pendapatan kerana terdapat juga individu yang memiliki kecacatan fizikal yang bekerja. Oleh itu, jika anak yang cacat ini berkemampuan untuk memperoleh pendapatan dan menyara kehidupan, mereka akan dikecualikan daripada menerima nafkah.

⁶² Al-Shirazi, Abi Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf al-Fyruz Abadi, *al-Muhadhdhab, Dar Ihya' al-Turath al-Arabi*, Beirut, 1414/1994, Jilid 2, hlm. 213

Ulama Mazhab Hanafi dan Shafii seterusnya menegaskan bahawa anak yang sedang melanjutkan pengajian berhak mendapat nafkah jika mereka tidak mempunyai masa untuk bekerja.⁶³ Pendapat ini disokong sepenuhnya oleh ulama kontemporari yang menekankan bahawa kelayakan anak untuk memperoleh nafkah bergantung pada tahap pencapaian akademik mereka. Pendapat ini ternyata kukuh dan bersesuaian dengan situasi kini. Pandangan ini bukan sahaja melindungi hak anak terhadap nafkah bahkan juga hak terhadap pendidikan. Walau bagaimanapun, pandangan ini tidak menyebut dengan jelas sehingga tahap manakah seseorang anak masih berkelayakan memperoleh nafkah. Kelihatannya, kelayakan ini harus dibataskan sehingga tamatnya pengajian pada peringkat ijazah pertama.

Di samping itu, ulama Mazhab Hanbali menegaskan bahawa bagi anak yang telah dewasa dan belum memperoleh pekerjaan, mereka masih layak untuk diberikan nafkah.⁶⁴ Pandangan ini merupakan pandangan ulama Mazhab Maliki juga dan disokong oleh ulama kontemporari seperti al-Syalabi dan al-Zuhayli, yang menjelaskan bahawa ketidakmampuan untuk menyara kehidupan mungkin disebabkan kesukaran memperoleh pekerjaan akibat pengangguran. Meskipun pandangan ini boleh diterima tetapi hendaklah terpakai dalam situasi pekerjaan sukar diperoleh kerana dalam keadaan tersebut, anak tidak mempunyai sumber pendapatan untuk menyara diri sendiri.

Oleh yang demikian, anak sama ada yang masih di bawah umur atau yang telah dewasa, dan sama ada lelaki atau perempuan, selagi mereka tidak mempunyai harta dan tidak mampu menyara kehidupan, berhak dan layak untuk memperoleh nafkah. Ketidakmampuan ini sama ada disebabkan sesuatu penyakit, mempunyai masalah mental, mengalami kecacatan fizikal, atau juga

⁶³ Al-Dimyati, al-Sayyid al-Bakri ibn al-Sayyid Muhammad Shata, *Hashiyah I'annah al-Talibin*, Dar al-Fikr, Beirut, 1422/2002, Jilid 4, hlm. 111

⁶⁴ Ibn Muflih, Abi Ishaq Burhan al-Din Ibrahim ibn Muhammad, *al-Mubdi' Sharh al-Muqni'*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 1418/1997, Jilid 7, hlm. 170

kerana sedang mengikuti pengajian, atau menghadapi kesukaran untuk mendapatkan pekerjaan. Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) tahun 1984 memperuntukkan nafkah bagi anak lelaki sehingga mencapai umur lapan belas tahun melainkan bagi anak kurang upaya dan tidak mampu untuk menyara kehidupan. Bagi anak perempuan pula, nafkah yang diperuntukkan untuknya sehingga ia berkahwin. Peruntukan ini selari dengan pandangan Mazhab Maliki. Walau bagaimanapun, seseorang anak boleh memohon tempoh lanjutan bagi nafkah untuk tujuan melanjutkan pengajian peringkat tinggi atau mengikuti latihan.⁶⁵

Perbincangan di atas telah menunjukkan bahawa anak-anak berhak memperoleh nafkah sehingga mereka mencapai usia lapan belas tahun, iaitu sekiranya mereka telah menamatkan pengajian. Sebaliknya, jika mereka masih belajar, mereka berhak memperoleh nafkah sehingga menyelesaikan pengajian ijazah pertama. Dalam hubungan ini, tiada perbezaan antara anak lelaki dengan anak perempuan kerana sama seperti lelaki, wanita pada hari ini berupaya mencari nafkah bagi menyara kehidupan.

Para fuqaha bersepakat bahawa individu utama yang bertanggung jawab untuk menanggung dan memberikan nafkah terhadap anak-anaknya ialah bapa.⁶⁶ Bapa bertanggungjawab sepenuhnya untuk memberikan nafkah kepada anaknya dan tanggungjawab ini tidak dikongsi dengan orang lain. Tanggungjawab ini didasarkan pada ayat 233, Surah al-Baqarah dan Hadis Nabi SAW dalam kisah Hind, isteri Abu Sufian, sebagaimana yang telah dibincangkan sebelum ini. Tambahan pula, anak-anak dianggap sebagai sebahagian bapa, maka bapa berkewajipan menanggung anak-anak yang merupakan sebahagian dirinya, sama seperti ia menanggung dirinya sendiri.

⁶⁵ Badruddin Hj Ibrahim & Azizah Mohd, *Hak Anak Terhadap Nafkah Dalam Perundangan Islam: Sejauh Manakah Bapa Bertanggungjawab Menanggung Nafkah Anaknya*, (Selangor: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Disember 2013), hlm. 262

⁶⁶ Al-Marghinani, Burhanuddin Ali ibn Abi Bakr, *al-Hidayah Sharh Bidayat al-Mubtadi*, Dar al-Salam, Kaherah, 1420H/2000, Jilid. 3, hlm. 653

Di Malaysia, tanggungjawab tersebut dinyatakan dalam seksyen 72 ayat 1 Akta Undang-undang Keluarga Islam yang menyatakan:

Kecuali jika sesuatu perjanjian atau perintah Mahkamah memperuntukkan selainnya, maka adalah menjadi kewajipan seorang lelaki menanggung nafkah anak-anaknya, sama ada anak itu berada dalam jagaannya atau dalam jagaan seseorang lain...⁶⁷

Daripada peruntukan ini dapat difahami bahawa perkataan lelaki dalam klausa yang disebut tidak membawa maksud lain selain bapa kerana tercatat perkataan “anak-anaknya”. Selain itu, peruntukan ini juga jelas menetapkan bahawa bapa bertanggungjawab untuk menyediakan nafkah bagi anaknya, tanpa mengira sama ada mereka berada di bawah asuhan atau orang lain. Seterusnya, peruntukan ini menekankan bahawa kewajipan bapa terhadap anaknya tidak akan terhenti meskipun selepas berlakunya pembubaran perkahwinan, dan anaknya tidak berada dalam jagaannya tetapi dalam jagaan bekas isteri atau saudara-mara yang lain.

Akta Undang-undang Keluarga Islam tidak menetapkan tahap tanggungjawab seorang bapa untuk menyediakan nafkah bagi anak-anaknya melainkan berdasarkan kemampuan beliau semata-mata. Untuk tujuan itu, Akta Undang-undang Keluarga Islam menyediakan kaedah penilaian jumlah nafkah yang disediakan berdasarkan kemampuan dan kedudukan bapa. Walau bagaimanapun, terdapat peruntukan yang memberikan kuasa kepada mahkamah untuk mengeluarkan perintah bayaran nafkah dalam beberapa keadaan, seperti jika bapa enggan atau telah mengabaikan tanggungjawab untuk menyediakan nafkah yang berpatutan dan munasabah; juga jika suami telah meninggalkan isterinya dan anak berada dalam jagaan isteri; atau prosiding bagi hal perkahwinan sedang berjalan dan belum selesai.

⁶⁷ Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984, Akta 303, Seksyen 72 Ayat 1

Berdasarkan apa-apa yang telah dibincangkan secara meluas dan umum oleh sarjana Islam klasik dan kontemporari, pada asasnya nafkah terdiri daripada tiga keperluan asas yang penting, iaitu makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Walau bagaimanapun, sesetengah ulama Mazhab Hanafi dan Shafii menegaskan bahawa peruntukan nafkah untuk anak hendak turut merangkumi anak yang sedang mengikuti pengajian. Hal ini menunjukkan bahawa pendidikan juga merupakan salah satu komponen penting nafkah. Selain itu, al-Syarbini dan al-Ramli daripada Mazhab Shafii berpendapat bahawa nafkah hendaklah juga mencakupi kos rawatan dan perubatan.⁶⁸

Di Malaysia, meskipun tidak terdapat definisi yang jelas tentang komponen nafkah anak-anak, undang-undang mengambil kira unsur yang telah dinyatakan sebelum ini. Sebagai contoh, seksyen 72 ayat 1 Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984 menyatakan bahawa:

“Kecuali jika sesuatu perjanjian atau sesuatu perintah Mahkamah memperuntukkan selainnya, maka adalah menjadi kewajipan seorang lelaki menanggung nafkah anaknya, sama ada anak itu berada dalam jagaannya atau dalam jagaan seseorang lain, sama ada dengan mengadakan bagi mereka tempat tinggal, pakaian, makanan, perubatan, dan pelajaran, sebagaimana yang munasabah memandang kepada kemampuan dan taraf kehidupannya, atau dengan membayar kosnya.”

Perbincangan ini menunjukkan bahawa nafkah terhadap anak-anak tidak hanya terbatas pada makanan, pakaian, dan tempat tinggal sahaja, bahkan turut meliputi rawatan perubatan, ubat-ubatan, dan pendidikan, disebabkan kesemuanya dianggap sebagai keperluan dan penting dalam kehidupan hari ini. Walau bagaimanapun, peruntukan berkenaan dengan nafkah ini tertakluk pada

⁶⁸ Badruddin Hj Ibrahim & Azizah Mohd, *Hak Anak Terhadap Nafkah Dalam Perundangan Islam: Sejauh Manakah Bapa Bertanggungjawab Menanggung Nafkah Anaknya*, (Selangor: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Disember 2013), hlm. 268

keupayaan bapa atau individu atau pihak yang dipertanggungjawabkan selepas bapa.⁶⁹

Undang-undang Islam (syariah) telah menggariskan peranan seorang bapa dalam menyediakan nafkah untuk anak-anaknya secara jelas. Peranan dan tugas yang digariskan untuk menyediakan nafkah menjelaskan bahawa syariah Islam menekankan tanggungjawab bapa dalam melindungi kepentingan anak terhadap nafkah yang merupakan tanggungjawab dalam agama, terutamanya dalam keadaan mereka tidak mempunyai harta atau tidak berupaya untuk menyara kehidupan. Pada masa yang sama, undang-undang Islam juga melindungi hak mereka terhadap pendidikan. Seterusnya, kepentingan dan hak anak kurang upaya juga turut diberikan perlindungan dan jaminan. Meskipun di Malaysia, sudah terdapat peruntukan tentang nafkah anak dalam Enakmen Negeri-negeri, masih lagi terdapat kekurangan peruntukan undang-undang Islam yang jelas tentang sejauh manakah tanggungjawab bapa dalam menyediakan nafkah anak. Satu peruntukan undang-undang yang lebih jelas tentang tanggungjawab bapa terhadap nafkah anak dalam keluarga dirasakan amat perlu dan penting diwujudkan bagi melindungi hak anak terhadap nafkah. Bagi merealisasikan keperluan perundangan tersebut, peruntukan ini mestilah dimasukkan dalam Akta dan Enakmen Negeri-negeri sebagai tambahan kepada peruntukan yang sedia ada. Semoga dengan itu, bapa dan kaum kerabat yang berperanan dalam menunaikan tanggungjawab agama ini akan lebih memahami dengan jelas akan tanggung jawab mereka dalam memberikan nafkah kepada anak-anak demi menjamin masa depan mereka yang cemerlang.

E. Teori Efektivitas

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, efektivitas adalah istilah daripada kata efektif artinya ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesamaanya,

⁶⁹ Badruddin Hj Ibrahim & Azizah Mohd, *Hak Anak Terhadap Nafkah Dalam Perundangan Islam: Sejauh Manakah Bapa Bertanggungjawab Menanggung Nafkah Anaknya*, (Selangor: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Disember 2013), hlm. 269

manfaatnya dan membawa hasil berguna) manjur dan mujarab, dapat membawa hasil, mulai berlaku tentang peraturan perundang-undangan atau peraturan.⁷⁰ Kata efektif sendiri merupakan kata kerja, yaitu terjadinya satu akibat dan efek yang dikehendaki dalam perbuatan sehingga mengandung pengertian sudah dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.⁷¹ Istilah efektivitas dan efektif sebelumnya, pada mulanya merupakan unsur serapan dari Bahasa Inggris, yaitu dari kata *effective* yang bermakna berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik⁷². Selanjutnya, kata *effective* kemudian membentuk istilah *effectiveness*⁷³. Dari makna efektivitas dalam pengertian bahasa adalah berhasil tidaknya suatu program, kegiatan atau pelayanan sebagaimana telah dituangkan di dalam program dan perencanaan awal karena efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Di sisi lain, efektivitas pelaksanaan daripada kebijakan otonomi mahkamah syariah negeri bagian adalah sejauh mana kegiatan pemerintah negeri bagian dapat melaksanakan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengambil keputusan tentang partisipasi masyarakat. Pelaksanaan pembangunan serta pemecahan daripada beberapa permasalahan dalam pelaksanaan otonomi mahkamah syariah di negeri bagian.

Menurut Georgopoulos dan Tannenbaum, dikutip oleh Abdul Rahman Nur, efektivitas organisasi adalah tingkat sejauhmana organisasi yang merupakan sistem sosial dengan segala sumber daya dan juga sarana tertentu yang tersedia memenuhi tujuan-tujuannya tanpa pemborosan, dengan menghindari ketegangan yang tidak perlu antara anggota-anggotanya.⁷⁴ Dalam makna yang lebih luas,

⁷⁰ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). Hlm. 374

⁷¹ Alie Humaedi, *Etnografi Bencana: Menakar Peran Para Pemimpin Lokal dalam Pengurangan Resiko Bencana*, (Yogyakarta: LKiS, 2015). hlm. 41

⁷² Muhammad Sawir, *Birokrasi Pelayanan Publik: Konsep, Teori, & Aplikasi*, (Yogyakarta : Deepublish, 2020). hlm. 126

⁷³ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992). Hlm 227.

⁷⁴ Abdul Rahman Nur, *Konsepsi Negara Nachwachtes Staat Menuju Negara Welfare Staat dalam Menata Kota Palopo*, (Palopo: Guepedia, 2018). hlm. 84-85

efektivitas ialah ukuran kepada keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan organisasi. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut bisa dikatakan telah berjalan dengan efektif. Dengan begitu, efektivitas berhubungan dengan berhasil tidaknya sesuatu dalam menggapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam catatan Mardiasmo,⁷⁵ maksud efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya, apabila organisasi tersebut berhasil dalam mencapai tujuan yang sudah direncana dan ditetapkan sebelumnya, maka sudah dapat dikatakan efektif. Makna efektivitas seperti ini senada dengan rumusan sebelumnya, bahwa efektivitas selalu dikaitkan dengan keberhasilan mencapai suatu tujuan yang direncanakan.

Efektivitas berbeda dengan efisiensi. Efisiensi adalah perbandingan antara sumber daya yang digunakan dan *ouput*, artinya berapa besar *ouput* yang dihasilkan dalam prosesnya dibandingkan dengan *input* yang masuk. Singkatnya makin besar *output* yang dihasilkan dan semakin kecil *input* yang diperlukan maka semakin efisien. Sementara itu efektivitas adalah sejauh mana *output* yang dihasilkan dapat memenuhi sasaran dan tujuan manajemen, dimana ukuran efektivitas hampir selalu digunakan untuk menggambarkan kesesuaian rencana dengan realisasi.⁷⁶

Dalam konteks ini para ahli berbeda-beda dalam menetapkan indikator yang dapat dijadikan sebagai alat ukur efektivitas. Menurut Steers, dikutip oleh Hessel, ada lima indikator dalam mengukur efektivitas, yaitu:⁷⁷

1. Produktivitas
2. Kemampuan adaptasi dan fleksibilitas

⁷⁵ Kurhayadi, Yeti Rohayati, dan Bambang Sucipto, Kebijakan Publik di Era Digitalisasi, (Yogyakarta: Deepublish, 2020). hlm. 133

⁷⁶ Taufiqurokhman dan Evi Satispi, *Teori dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik*, (Tangerang: UMJ Press, 2018). hlm. 47

⁷⁷ Hessel Nogi Tangkilisan, *Manajemen Publik*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005). hlm. 141

3. Kepuasan kerja
4. Kemampuan ber laba
5. Pencarian sumber daya

Masih dalam kutipan yang sama, Gibson menyebutkan ada tujuh indikator di dalam mengukur efektivitas, yaitu:⁷⁸

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang matang
4. Perencanaan yang matang
5. Penyusunan program yang tepat
6. Tersedianya sarana dan prasarana
7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

Telah dijelaskan di atas oleh penulis mengenai efektivitas yang berarti kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum dengan pelaksanaannya. Efektivitas dalam suatu hukum ditentukan antara lain oleh tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri, termasuk para penegak hukumnya. Jadi tingkat kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu pertanda berfungsinya suatu sistem hukum sehingga tercapainya tujuan hukum dalam masyarakat. Suatu hukum tidak dapat berfungsi secara efektif tanpa adanya faktor pendukung lain seperti aparat penegak hukum dan masyarakat, namun hal tersebut tidak akan membuat hukum langsung dapat berfungsi secara efektif karena memerlukan beberapa langkah untuk hukum itu dapat dijalankan.

Pendapat Damang,⁷⁹ penerapan efektifitas dalam hukum memerlukan kekuatan fisik untuk menegakkan kaedah-kaedah hukum menjadi kenyataan

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Damang, 2011, Efektivitas Hukum (*online*), Diakses pada 22/12/2023 dari situs <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum.html>.

berdasarkan wewenang yang sah. Kekuatan fisik yang dimaksud boleh diartikan aparat penegak kepada hukum yang berfungsi sebagai pengawas, pelaksana maupun penegak sanksi yang diterapkan di masyarakat demi efektif kepada hukum. Sanksi pula merupakan pendukung kepada hukum yang mempunyai ciri-ciri sebagai sebuah harapan atau sebagai ancaman. Sanksi juga memberikan efek terhadap lingkungan. Kemudian sanksi merupakan suatu penilaian pribadi seseorang yang berkaitan dengan tingkah laku dan hati nurani yang tidak diakui atau dinilai tidak memiliki manfaat bila ditaati.

Untuk efektif kepada hukum memerlukan adanya aparat kepada penegak hukum untuk menegakkan sanksi. Sanksi diterapkan untuk kehidupan bermasyarakat untuk membentuk suatu ketaatan, maka dengan keadaan tersebut dapat menunjukkan tanda-tanda bahwa hukum tersebut adalah efektif. Suatu hukum itu tidak efektif dan tidak berfungsi selayaknya dalam masyarakat apabila diidentifitas dan juga dilihat dari tanda-tandanya antara lain tidak ada lembaga pelaksana, tidak diterapkan dalam praktek, hasil kritik dalam masyarakat, cepat berubah, kabur atau multi tafsir, tidak adanya publikasi ke masyarakat. Jika terdapat hal tersebut maka hukum itu menjadi tidak efektif dalam penerapannya.

Namun ada juga cara yang dipakai untuk membuat hukum itu menjadi efektif, menurut Muhammad Joni cara yang dipakai untuk membuat hukum menjadi efektif⁸⁰, antara lain:

- a) Pemerintahan yang efektif dan *clean governance*;
- b) Adanya Lembaga pelaksana;
- c) Adanya Lembaga penegakan hukum;
- d) Kesesuaian/penerimaan sebagai budaya hukum;
- e) Berbentuk substansi;
- f) Pengawasan dan partisipasi luas masyarakat;

⁸⁰ Muhammad Joni, 2003, Efektivitas Penerapan Hukum (*online*), Diakses pada 22/12/2023 dari situs <http://www.advokatmuhammadjoni.com/opini/artikel-hukum/181-efektifitas-penerapan-hukum.html>.

g) Kepercayaan dan kepatuhan kepada hukum.

Bila melihat penjelasan di atas begitu banyaknya unsur yang dapat ditempuh untuk mewujudkan efektivitas hukum dalam masyarakat. Dari beberapa unsur tersebut saling berhubungan dan keterkaitan antara satu dan lainnya supaya terciptanya pengertian bersama demi tercapainya tujuan hukum. Selain itu kesadaran hukum oleh masyarakat juga berpengaruh terhadap penerapan efektivitas hukum, karena jika kesadaran masyarakat terhadap hukum semakin tinggi maka tingkat kepatuhannya juga semakin tinggi begitu pula sebaliknya jika kesadaran masyarakat terhadap hukum rendah maka kepatuhan terhadap hukum juga rendah. Kesadaran masyarakat terhadap hukum juga tergantung terhadap ketentuan hukum itu sendiri, apakah benar-benar berfungsi atau tidaknya ketentuan hukum dalam masyarakat. Menurut pendapat dari Zainuddin Ali⁸¹, untuk meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hukum perlu adanya pengetahuan mengenai hukum, pemahaman mengenai hukum, pengharapan terhadap hukum dan peningkatan terhadap kesadaran hukum.

Berdasarkan beberapa keterangan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan dalam melihat indikator yang menentukan suatu kinerja dapat berjalan efektif atau tidak. Dari pandangan-pandangan dan huraian di atas, maka yang menjadi titik tolak pengukur atau indikator efektivitas yang boleh digunakan secara keseluruhan dari indikator-indikator di atas. Oleh sebab itu, penulis membatasinya dalam beberapa indikator saja, yaitu berikut ini:

1. Kemudahan produktivitas dan akses atau *output*
2. Kemampuan adaptasi dan fleksibilitas
3. Kebolehan menangani hambatan atau kendala proses

⁸¹ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 62.

BAB TIGA

EFEKTIVITAS PERAN BAHAGIAN SOKONGAN KELUARGA (BSK) DALAM MENJAMIN TERPENUHNYA NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI MAHKAMAH TINGGI SYARIAH PERLIS

A. Profil Pembentukan Bahagian Sokongan Keluarga (BSK)

Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) merupakan sebuah departemen khusus di Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) yang berada di bawah Jabatan Perdana Menteri (JPM). Pembentukan BSK adalah suatu pihak yang berwenang yang mampu mengatasi segala permasalahan terkait dengan pemberian nafkah, hal ini untuk memastikan bagi mereka yang berhak mendapat keadilan. Hal ini merupakan salah satu usaha untuk memastikan keadilan dalam Islam bukan hanya sekedar peraturan di atas kertas, akan tetapi peraturan tersebut perlu dilaksanakan agar semua pihak memperoleh haknya sesuai dengan hukum syarak.⁸²

1. Sejarah Pembentukan Bahagian Sokongan Keluarga (BSK)

Masalah dalam Mahkamah Syariah dengan orang Islam bukanlah satu hal yang baru. Dari kasus-kasus litigasi kekeluargaan dan keterlambatan dari pihak Mahkamah dalam menyelesaikan suatu kasus, termasuk kasus perceraian, kasus tuntutan nafkah, hadhanah, poligami, mut'ah dan harta bersama. Semua kasus di atas merupakan topik yang hangat yang di sering diperbincangkan di dalam media lokal dan penulisan. Dari berbagai kritik dan pandangan Mahkamah Syariah umumnya dan JKSM khususnya telah bekerja keras untuk menemukan solusi bagi masalah ini. Masalah perintah pemeliharaan dari Mahkamah Syariah yang gagal atau tidak dapat diandalkan telah menarik perhatian para pemimpin nasional.

⁸² Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia Jabatan Perdana Menteri, *Bahagian Sokongan Keluarga (BSK)*, t.th., hlm. 3.

Pada tanggal 7 Juni, pihak Musyawarah Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia ke-46 yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia yaitu, Dato[™] Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi telah menyetujui agar Kehakiman Syariah Malaysia mewujudkan Bahagian Sokongan Keluarga (BSK). Ianya dipersetujui rentetan daripada keruncingan masalah pengabaian perintah mahkamah berkaitan pemberian nafkah khususnya di Malaysia. Hasil persetujuan itu, pembentukan BSK di bawah wewenang Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) dan telah diresmikan pada bulan Oktober 2008 dan diberlakukan sejak April 2009.

Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) JKSM telah diresmikan pada 22 Oktober 2008 oleh YB Dato[™] Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Menteri di Jabatan Perdana Menteri JKSM, Aras 3, Blok D7, Putrajaya. Dalam hal ini Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) telah menerima dana yang pertama sebanyak RM 500,000.00 (Rp. 1,750,000.000.00) dari Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP).⁸³ Pada bulan Desember 2009, hasil pada suatu pertemuan ketua-ketua Hakim Syarie Seluruh Malaysia ke-50 menyetujui penempatan Pegawai dan karyawan BSK di Mahkamah Syariah negeri-negeri yang disebut Seksyen Bahagian Sokongan Keluarga (SBSK).

Pembentukan Bahagian Sokongan Keluarga Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perlis (BSK JKSNP) dibentuk pada 2009 sebenarnya bertindak sebagai sebuah Departemen Pemerintahan di bawah lembaga Kehakiman Syariah Malaysia untuk menegakkan peraturan terhadap nafkah anak, nafkah iddah atau isteri yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah seluruh Negeri Perlis. Lembaga ini berfungsi untuk melanjutkan keputusan dari Mahkamah Syariah demi kepentingan pihak yang teraniaya dalam mengembalikan hak-hak mereka yang diabaikan setelah Mahkamah mengeluarkan putusan.

⁸³ Portal Rasmi Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Diakses pada 6/11/2023 dari situs <http://www.mswp.gov.my/index.php/ms/mengenai-mswp/perkhidmatan/bahagian-sokongan-keluarga/maklumat-am/>

Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) ini antara fokusnya adalah pada permasalahan nafkah anak yang tidak dipenuhi oleh ayah pasca perceraian. Dalam hal ini, BSK bertindak dengan mengutamakan proses Penegakan dan Pelaksanaan Putusan tersebut. BSK terdiri dari 3 unit yaitu Unit Khidmat Nasihat dan Perundangan (UKNP), Unit Penguatkuasaan dan Pelaksaaan Perintah (UPPP) dan Unit Pengurusan Dana (UPD).

BSK mengambil otoritas Penegakan dan Pelaksanaan putusan mahkamah yang terkandung dalam *Risalah Al-Qadha*” daripada Saidina Umar al-Khattab kepada Abu Musa al-Ash”ari menyatakan “Sesuatu perintah menjadi sia-sia sekiranya tidak dapat dilaksanakan”. Otoritas ini menunjukkan bahwa kewajiban Mahkamah untuk memastikan semua putusan yang dikeluarkan dapat terlaksana dengan baik sehingga masyarakat yang berhak dapat menikmati manfaat dari putusan tersebut. Dengan demikian, pihak pemerintah telah mengambil langkah proaktif dengan memberi tanggungjawab kepada kepada JKSM untuk membentuk BSK bagi mengatur dan menegakkan perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah. Hal ini diwujudkan dengan pembentukan Seksyen Bahagian Sokongan Keluarga (SBSK) di setiap lembaga Kehakiman Syariah Negeri (JKSN)/ Mahkamah Syariah Negeri (MSN).

Yang menjadi landasan dalam pembentukan BSK adalah Seksyen 3 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah negeri-negeri yaitu; Bailif⁸⁴ bagi pelaksanaan peraturan Mahkamah Syariah dan Seksyen serta enakmen yang berkenaan dengan unit pembentukan kaedah-kaedah BSK yaitu:

- a. Panitia Kaedah-Kaedah Mahkamah Syariah boleh membuat kaedah-kaedah yang hendaklah disiarkan dalam berita media, bagi yang menjalankan peruntukan Enakmen ini khususnya, tanpa menjejaskan

⁸⁴ “Bailif” Pegawai Mahkamah - Kebiasaanya di mahkamah peringkat daerah; yang bertugas mengawasi proses mahkamah dan penguatkuasaanya perintah-perintahnya, terutama sekali waran pelaksanaan membenarkan perampasan barangan penghutang. Istilah ini juga digunakan untuk pegawai sherif.

keluasan peruntukan yang terdahulu, kaedah-kaedah ini juga dapat membuat peruntukan bagi:

- 1) Tatacara dan amalan kantor pendaftaran Mahkamah Syariah;
- 2) Fi, elaun dan kos yang kena dibayar berkenaan dengan prosiding di bawah Enakmen ini;
- 3) Tatacara mengenai sulh;
- 4) Borang, buku akaun, laporan dan dokumen lain yang hendak digunakan berkenaan dengan apa-apa perbuatan atau benda yang dilakukan di bawah atau menurut Enakmen ini; dan
- 5) Perjalanan Mahkamah, bentuk dan kaedah pelaksanaan surat cara dan perlantikan pegawai dan ejen Mahkamah.⁸⁵

Adapun tujuan pembentukannya adalah untuk mengawasi dan menangani masalah ketidakpatuhan terhadap perintah nafkah dari Mahkamah Syariah dan untuk memastikan perintah tersebut dilaksanakan dengan baik demi kelangsungan masalah isteri pasca perceraian. Dari sudut manajemen, Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) mempunyai tiga fungsi/unit utama yaitu:

- a. Unit Khidmat Nasehat Perundangan (UKNP)
- b. Unit Penguatkuasaan dan Pelaksanaan Perintah (UPPP)
- c. Unit Pengurusan Dana (UPD)

Di samping itu, BSK Perlis menawarkan beberapa layanan BSK Transit dalam bentuk kemudahan penginapan sementara termasuk makan minum dan pengangkutan percuma untuk pemohon yang layak untuk memudahkan menghadiri perbicaraan. Bantuan ini ditawarkan untuk meringankan beban keuangan mereka yang berada di luar Negeri Perlis dan terpaksa bolak balik

⁸⁵ Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah 2006, Kaedah-Kaedah Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah Sulh Perlis 2018 (Undang-Undang Perlis) 17 Januari 2019, hlm. 12

kembali ke Mahkamah Syariah sehingga tuntutan atau proses hukum selesai. Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) juga, telah mempercepat proses mahkamah dengan demikian dapat mengurangi kasus-kasus yang tertunda di mahkamah akibat ketiadaan pihak-pihak yang bersangkutan ke mahkamah akan merasa lebih nyaman dan tenang dalam persidangan di mahkamah yang tertangguh melebihi tempoh setahun kini sudah mulai berkurangan berbanding sebelum ini.

Dalam hal ini, terdapat dua implementasi BSK dalam mendapatkan informasi. Fase awal gerak kerja BSK adalah memerlukan para petugas BSK sendiri turun ke setiap daerah bagi melaksanakan pantauan tentang kasus- kasus kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat terutamanya dari sudut pengabaian nafkah daripada ayah. Namun, kemajuan di peroleh pada awal tahun 2012 yang merupakan fase kedua dimana Bahagian Teknologi Maklumat Komputer (BTMK)⁸⁶ JKSM telah mewujudkan sebuah sistem situs web yang bernama E-Syariah dan E-Nafkah untuk memfasilitasi BSK dalam menjalankan tugasnya seperti proses pengumpulan data kasus.

Informasi berkaitan perintah nafkah yang terdaftar di sistem E-Syariah akan terus dikirim ke sistem E-Nafkah secara otomatis. Dengan demikian, Petugas Pembantu Syariah yang bertugas dapat melakukan pengawasan harian atas putusan yang berkaitan dengan nafkah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah dalam tempoh dua bulan saat putusan tersebut dikeluarkan.

2. Visi, Misi, Objektif, dan Tujuan Bahagian Sokongan Keluarga (BSK)

Visi Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) adalah “Berusaha menjadikan Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) sebagai sebuah organisasi sokongan keluarga yang unggul bagi membantu sistem pengukuhan kekeluargaan Islam ke arah pengwujudan masyarakat penyayang, penduduk berkualiti dan bangsa Malaysia yang progresif.”

⁸⁶ Portal Pressreader, Berita Harian Malaysia, Diakses pada tanggal 6/11/2023 dari situs PressReader.com - [Digital Newspaper & Magazine Subscriptions](http://PressReader.com)

Seterusnya misi Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) pula adalah “Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) komite yang bertindak sebagai agensi utama dalam menjadikan Malaysia sebagai negara yang rakyatnya mengutamakan sistem kekeluargaan berlandaskan ajaran Islam, peribadi mulia hasil daripada keluarga yang kukuh, berakhlak, sehat, berilmu dan harmoni.”

Objektif pembentukan Bahagian Sokongan Keluarga (BSK):

- a. Memelihara kepentingan golongan yang berhak menerima nafkah melalui perintah mahkamah pada soal nafkah.
- b. Mengenal pasti dan menyelesaikan masalah kreditor dan debitor terutama yang melibatkan nafkah.
- c. Mengatasi masalah isu keterlambatan dalam pengendalian kasus-kasus penegakan perintah nafkah.
- d. Memelihara hak dan tanggung jawab pihak-pihak yang termasuk di dalam institusi kekeluargaan.

Tujuan Bahagian Sokongan Keluarga (BSK):

- a. Mengurus tindakan penegakan dan pelaksanaan perintah nafkah Mahkamah Syariah yang berkesan dan efisien.
- b. Meningkatkan sistem manajemen kasus di Mahkamah Syariah Negeri- Negeri.

3. Fungsi Bahagian Sokongan Keluarga (BSK):

Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) di Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) merupakan sebuah unit yang ditubuhkan pada 7 Juni 2007 oleh Yang Amat Berbahagia (Y.A.B.) Perdana Menteri bagi menyelesaikan kasus nafkah isteri dan anak serta mengambil tindakan ke atas individu yang ingkar mematuhi perintah mahkamah dengan lebih proaktif dan efektif.

Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) merupakan sebuah langkah yang bijak dan tepat terutamanya bagi mengatasi masalah berkaitan dengan pelaksanaan perintah mahkamah. Antara fungsi Bahagian Sokongan Keluarga di Mahkamah Syariah adalah seperti berikut⁸⁷:

- a. Memberi nasihat perundangan Syariah kepada para pihak secara khusus berkaitan tuntutan nafkah serta tatacara penegakan dan pelaksanaan penghakiman selepas suatu perintah dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah.
- b. Melaksanakan tugas Peguam Syarie (pengacara) dan Bailif dalam pelaksanaan penghakiman dan penegakan perintah yang dibuat oleh Mahkamah Syariah berkaitan dengan nafkah untuk memastikan suatu perintah dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua pihak.
- c. Melaksanakan manajemen berkaitan dengan penegakan dan pelaksanaan penghakiman Mahkamah Syariah antara Negeri-Negeri berjalan dengan lancar.
- d. Menguruskan bantuan keuangan sementara melalui seleksi kelayakan dan laporan khidmat nasehat untuk pertimbangan Jawatankuasa Akaun Amanah bagi membantu Pemiutang Penghakiman terutamanya istri dan anak-anak.

B. Peran Bahagian Sokongan Keluarga dalam Penuntutan Nafkah Anak Pasca perceraian

Kegiatan Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) telah berjalan sejak tahun 2009, beberapa pegawai telah ditugaskan di negeri-negeri seluruh Malaysia termasuk negeri Perlis yang terdiri dari seorang Penolong Pengarah Kanan (Gred LS44), dua orang Penolong Pegawai Syariah (Gred LS32 & LS29), seorang Pembantu Syariah (LS19) dan seorang Pembantu Tadbir (Gred W19). Terdapat

⁸⁷ Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia Jabatan Perdana Menteri, *Bahagian Sokongan Keluarga (BSK)*, t.th., Hlm. 9

lima pegawai yang merupakan lantikan federal bagi setiap negeri sebagai upaya BSK bagi memastikan keadilan syariah dapat ditegakkan.

Secara umum, BSK mempunyai empat peran utama untuk memastikan masalah putusan nafkah yang dikeluarkan oleh Mahkamah pasca perceraian terlaksana. Pertama, menjadi tempat rujukan dan untuk mendapatkan bantuan bagi mereka yang tidak mendapat nafkah karena kegagalan mantan suami untuk mematuhi perintah mahkamah. Kedua, untuk mengatasi masalah keterlambatan manajemen dan penegakan perintah nafkah. Ketiga, untuk melindungi hak pihak yang seharusnya menerima nafkah dan memastikan tanggung jawab pihak pemberi nafkah berjalan dengan baik. Keempat, untuk memastikan perintah Mahkamah Syariah dihormati dan diimplementasikan dengan baik serta meningkatkan status dan posisi Mahkamah Syariah, terutama dalam hal pelaksanaan putusan Mahkamah Syariah.⁸⁸

Dari sudut manajemen operasionalnya, Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) memiliki tiga unit layanan yang akan memastikan peran BSK terlaksana bagi menyelesaikan kelalaian nafkah yaitu:

1. Unit Khidmat Nasihat dan Perundangan (UKNP)

Unit ini berperan untuk memberikan nasehat undang-undang kepada pihak-pihak terkait tentang tuntutan yang dapat dibuat di Mahkamah Syariah setelah perceraian, terutama tuntutan nafkah isteri, dan prosedur penegakan pelaksanaan putusan Mahkamah. Namun unit ini juga bertanggung jawab mengendalikan sesi khidmat nasehat kepada pelanggan Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) yaitu penuntut atau pemohon nafkah.

⁸⁸ Roslina Che Soh, *Jurnal Kanun, Bahagian Sokongan Keluarga Membantu Anak Selepas Perceraian: Keberkesanan, Cabaran Dan Perbandingan Dengan Amalan Negara Maju*, 2017, hlm. 64

Bagi pengadu yang telah memperoleh perintah nafkah dari mana-mana Mahkamah Syariah di Malaysia, pegawai BSK akan membuat revisi ke atas perintah tersebut melalui sistem e-Nafkah sama ada ia telah dipatuhi oleh ayah kepada anak tersebut. Selain mendapatkan informasi daripada pihak pengadu tentang status pelaksanaan perintah, UKNP juga akan mengeluarkan notis⁸⁹. Untuk memanggil ayah kepada anak tersebut untuk hadir ke unit ini dengan tujuan investigasi tentang pelaksanaan putusan nafkah seperti yang telah ditetapkan oleh Mahkamah. Jika didapati ayah kepada anak tersebut gagal untuk mematuhi perintah yang telah dikeluarkan, maka pegawai BSK di unit ini akan menjalankan suatu proses mediasi.

Dalam proses mediasi ini, pegawai BSK adalah fasilitator kepada para pihak untuk berkomunikasi secara efektif bagi mendapatkan persetujuan bersama antara kedua pihak dalam pelaksanaan putusan nafkah sebagaimana yang telah diperintah oleh Mahkamah. Jika kedua pihak ini mencapai persetujuan untuk memenuhi tuntutan bagi melaksanakan putusan tersebut, maka perjanjian persetujuan tersebut akan ditandatangani oleh kedua pihak dan seterusnya akan diserahkan dihadapan Hakim Syarie⁹⁰ untuk pengesahan perjanjian tersebut.

Namun jika tidak ada kesepakatan dicapai, tindakan penegakan hukum dan pelaksanaan putusan akan dilaksanakan oleh UPPP. Sementara menunggu proses penegakan dan pelaksanaan putusan diselesaikan, pegawai BSK di UKNP akan sarankan kepada UPD agar pendahuluan nafkah anak dibayar mengikut kadar nafkah yang telah diputuskan dalam perintah. Jika ayah tidak hadir pada sesi Khidmat Nasihat, UKNP akan menyalurkan kasus tersebut kepada UPPP untuk proses penegakan perintah hukum dan pelaksanaan putusan dari mahkamah.

⁸⁹ “Notis” adalah pemberitahuan bertulis melainkan jika ada apa-apa hal yang diperintahkan oleh Mahkamah.

⁹⁰ “Hakim Syarie” atau “Hakim” artinya seorang Hakim Mahkamah Tinggi Syariah atau Mahkamah Rendah Syariah, mengikut mana-mana yang berkenan, yang dilantik di bawah seksyen 59 dan seksyen 58 Enakmen Pentadbiran.

2. Unit Penguatkuasaan dan Pelaksanaan Perintah (UPPP)

Unit ini berperan menjalankan tugas sebagai Peguam Syarie dalam mendapatkan perintah penguatkuasaan daripada Mahkamah Syariah yang berkaitan serta tugas Bailif bagi menjalankan kaedah-kaedah pelaksanaan perintah yang diputuskan oleh Mahkamah.

Proses untuk menguatkuasakan dan melaksanakan perintah nafkah yang dikontrol oleh UPPP melibatkan 3 peringkat seperti berikut:

Peringkat Pertama: Pra Perbicaraan

- a. UPPP menerima penyelesaian kasus yang berhasil melalui negosiasi di tingkat UKNP untuk mengajukan ke mahkamah untuk mendapatkan keputusan mahkamah di hadapan hakim.
- b. Selain itu, UPPP juga menerima kasus yang gagal melalui negosiasi di tingkat UKNP. Seterusnya UPPP akan menentukan jenis tindakan eksekusi Pelaksanaan Perintah dalam satu bentuk tindakan seperti berikut:
 - 1) Notis tunjuk sebab/ Komital-Notis tunjuk sebab dikeluarkan kepada Penghutang Penghakiman untuk menunjukkan sebab kenapa mantan suami tidak dimasukkan ke penjara karena tidak melaksanakan perintah Mahkamah.
 - 2) Penyitaan dan pelelangan, Pemohon untuk menyita dan menjual lelang harta-harta milik Penghutang Penghakiman.
 - 3) Penyitaan dan Penghantaran serahan Harta Alih. Permohon untuk menyita harta alih Penghutang Penghakiman dan menyerahkan kepada Pemiutang Penghakiman.
 - 4) Hiwalah – Sekiranya wang Penghutang Penghakiman di bawah milikan pihak ketiga untuk dibayar kepada Penghutang Penghakiman.
 - 5) Saman Penghutang Penghakiman.

- 6) Notis Penghakiman.⁹¹
 - 7) Ubah Perintah Saman Penghutang Penghakiman.
- c. Setelah tindakan perundangan diidentifikasi, pegawai BSK di UPPP akan menyediakan pliding⁹² permohonan yang relevan untuk diajukan di pengadilan dan mendapatkan tanggal sebutan kali pertama di Mahkamah.
 - d. Bagi kasus yang Penghutang Penghakiman berada di luar unit kuasa Mahkamah Negeri berkaitan, Peguam Syarie perlu memfailkan Pemohonan Interlokutori⁹³ untuk memohon Perintah Penyampaian Saman di Luar Unitkuasa.
 - e. Peguam Syarie akan membaca wakalah perlantikan bersama Pemiutang Penghakiman di hadapan Pendaftar Mahkamah.
 - f. UPPP menyelesaikan proses penyampaian saman atau notis serta pliding kepada Penghutang Penghakiman.

Peringkat Kedua: Perbicaraan

Pegawai BSK yang diberikan tauliah sebagai Peguam Syarie akan menghadiri dan mengendalikan perbicaraan kasus di Mahkamah sehingga Mahkamah mengeluarkan perintah Penguatkuasaan dan Pelaksanaan Perintah.

Peringkat Ketiga: Pasca Perbicaraan

- a. UPPP akan memfailkan draf perintah yang diperolehi ke mahkamah dan akan dikontrol sehingga perintah bersih diperolehi.

⁹¹ “Penghakiman” termasuk alasan penghakiman.

⁹² “*Pliding*” adalah pernyataan bertulis yang formal dalam suatu tindakan sivil yang diserahkan oleh setiap pihak terhadap yang satu lagi.

⁹³ “*Interlokutori*” adalah bantahan terhadap arahan yang dibuat ketika peringkat interlokutori (di peringkat perbicaraan) litigasi sivil.

- b. Peguam Syarie menyerahkan perintah yang diperoleh tersebut kepada pegawai BSK yang diberikan lantikan Bailif untuk melaksanakan perintah pelaksanaan.
- c. Bailif menyerahkan perintah yang diperoleh kepada Penghutang Penghakiman.
- d. Bailif akan melaksanakan perintah pelaksanaan yang berkaitan mengikut prosedur undang-undang yang telah ditetapkan (Manual kerja Bailif). Jumlah uang yang diperoleh dari tindakan Bailif akan diserahkan kepada Pemiutang Penghakiman dan lebihan uang yang diperoleh dari tindakan pelaksanaan Bailif akan dikembalikan kepada Penghutang Penghakiman mengikut prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang.

3. Unit Pengurusan Dana (UPD)

Peran UPD adalah bertanggung jawab untuk menanggung pembayaran pendahuluan nafkah kepada mantan isteri berdasarkan laporan yang dikemukakan oleh UKNP. Seterusnya UPD akan menguji untuk menentukan kebenaran keterangan yang dikemukakan Pengadu dan apabila didapati layak menurut kriteria dan syarat tertentu, khususnya mungkin mendapatkan dana pendahuluan nafkah yang disalurkan. Cadangan bayaran pendahuluan nafkah akan diusulkan untuk pertimbangan komite Akaun Amanah mengikut jumlah nafkah yang telah diperintahkan oleh Mahkamah.

Pendahuluan bayaran nafkah ini bukanlah sebagai pembayaran langsung atau dihapuskan kepada pemohon/penerima, sebaliknya ia akan dikumpul kembali daripada mantan suami yang telah gagal memberikan nafkah kepada mantan isteri melalui proses penguatkuasaan dan pelaksanaan perintah di Mahkamah Syariah. UPD hanya membayar dana pendahuluan nafkah ini dalam

masa enam bulan saja bagi meringankan beban yang ditanggung mantan isteri.⁹⁴ Pada masa yang sama pegawai BSK di UPPP bertindak sebagai Peguam Syariah akan mendaftarkan sanksi saman di mahkamah untuk mendapatkan perintah penguatkuasaan dan pelaksanaan ke atas mantan suami yang gagal memberikan nafkah kepada mantan isterinya tersebut.

- a. Beragama Islam
- b. Telah memperoleh perintah di Mahkamah Syariah
- c. Berada di tempat tinggal pada negeri di mana permohonan pendahuluan dana Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) dilakukan.
- d. Bersedia untuk memfailkan permohonan penguatkuasaan dan pelaksanaan perintah Mahkamah Syariah.
- e. Bersetuju untuk bekerjasama dalam memastikan bahwa tindakan yang tepat dapat diambil terhadap penghutang penghakiman.
- f. Ada keandalan bahwa mantan suami dapat dideteksi dan dihubungi.⁹⁵

Pihak BSK dari UPPP akan membuat pengambalian Dana Pendahuluan Nafkah semula yang telah diterima oleh mantan istri kepada mantan suami dalam tempoh enam bulan tersebut melalui instrumen penguatkuasaan dan pelaksanaan perintah sebagaimana yang telah diperuntukkan di bawah akta/ Enakmen Tatacara Mal. Setelah itu, UPPP yang diberikan tauliah oleh Mahkamah sebagai Bailif akan menentukan jenis tindakan penguatkuasaan dan pelaksanaan perintah

⁹⁴ Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia Jabatan Perdana Menteri, *Bahagian Sokongan Keluarga (BSK)*, t.th., hlm. 14

⁹⁵ Portal Rasmi Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Diakses tanggal 8/11/2023 dari situs [http://www.mswp.gov.my/index.php/ms/mengenai-mswp/perkhidmatan/bahagian-sokongan-keluarga/fungsi-peranan/unit-pengurusan-dana-upd/Mahkamah Syariah di Malaysia](http://www.mswp.gov.my/index.php/ms/mengenai-mswp/perkhidmatan/bahagian-sokongan-keluarga/fungsi-peranan/unit-pengurusan-dana-upd/Mahkamah%20Syariah%20di%20Malaysia).

dalam salah satu bentuk tindakan seperti saman penghutang, penyitaan dan penjualan, Hiwalah dan lain-lain lagi.⁹⁶

C. Efektifitas Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) Terhadap Pemenuhan Masalah Nafkah Anak Pasca Perceraian

Pada umumnya, Lembaga yang bertanggung jawab mengeluarkan perintah gugatan dan penegakan nafkah orang Islam ialah Mahkamah Syariah. Meskipun undang-undang boleh dikatakan sudah cukup sebagai asas tuntutan, tetapi pihak mahkamah hanya dapat berfungsi dengan berkesan apabila semua pihak yang terlibat memberi kerjasama. Hakikatnya masih banyak mantan suami tidak bekerjasama dan berusaha melarikan diri dari menunaikan tanggung jawab.

Pembentukan BSK telah membawa dimensi baru bagi masyarakat Islam di Malaysia untuk mendapatkan layanan penguatkuasaan dan pelaksanaan yang lebih efisien. BSK menggunakan undang-undang yang terkait hal nafkah anak yaitu Akta dan Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah. Contohnya di Perlis dikenali sebagai Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Perlis Tahun 2006. Menurut Enakmen ini, mahkamah boleh memerintahkan ayah membayar nafkah kepada anak sesuai dengan hukum syarak dan keperluan diperlukan.

Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) menggunakan undang-undang sebagai dasar dalam melakukan tindakan adalah pada Seksyen 73 tentang suatu peruntukan perintah Mahkamah bagi kewajiban menanggung nafkah anak baik anak tersebut di bawah jagaan ayah ataupun pada orang lain. Dengan adanya ketentuan ini sehingga memberikan peluang kepada yang menuntut nafkah membuat tuntutan di mahkamah jika suami gagal atau enggan membayar nafkah

⁹⁶ Tuan Mohd Jaidil Akhtar Bin Mahamod, Wawancara Pengarah Kanan di Seksyen Bahagian Sokongan Keluarga (BSK), Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perlis (JKSNP), 20 April 2023

selama perkawinan atau pasca perceraian sekaligus mengembalikan hak anak yang telah diabaikan oleh ayah.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Tuan Mohd Jaidil Akhtar Bin Mahmod telah menyatakan “Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) memikul peranan penting sebagai pembantu Hakim Mahkamah Syariah dalam melaksanakan Hukum Syarak dengan beraksi mengikut undang-undang sedia ada dalam mencegah berlakunya pengabaian nafkah kerana ia merupakan hak anak yang perlu ditunaikan atas asbab anak tidak ada kemampuan untuk sara kehidupan harian”.⁹⁷ Menurut penelitian dan pengamatan penulis daripada beberapa tahun kebelakangan ini, di negeri Perlis telah mencapai suatu angka kasus perceraian yang didaftarkan dengan purata sebanyak 1000 kasus permohonan perceraian pada setiap tahun.⁹⁸ Angka anggaran tersebut diungkapkan oleh Muhammad Hafeez Abu Seman yaitu Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pentadbiran Undang-Undang di Jabatan Agama Islam Negeri Perlis (JAIPs), di mana menjadi salah satu faktor terlihat kebiasaan kegagalan dalam melunaskan pembayaran nafkah. Boleh dilihat dengan jelas angka jumlah pernikahan dan perceraian daripada tiga tahun terakhir daripada tahun 2020 sehingga tahun 2022.

Table 7

Statistik Pernikahan dan Perceraian di Negeri Perlis bagi tahun 2020 - 2022

Tahun	2020		2021		2022	
Kasus	Nikah	Cerai	Nikah	Cerai	Nikah	Cerai
Jumlah Kasus	1 975	583	2 000	405	1 965	801

Sumber : Department of Statistics Malaysia

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Mohd Jaidil Akhtar Bin Mahmod Penolong Pengarah Seksyen Bahagian Sokongan Keluarga di Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM), Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) Negeri Perlis, 20 April 2023

⁹⁸ Portal Rasmi Majlis Agama Islam & Adat Istiadat Melayu Negeri Perlis (MAIPs), diakses pada 6/12/2023 dari situs https://maips.gov.my/index.php?option=com_k2&view=item&id=2780:kes-perceraian-jaips-terima-1-000-permohonan-setiap-tahun&Itemid=834&lang=img

Berdasarkan tabel data statistik yang terdapat di atas mengenai status pasangan islam yang bernikah dan bercerai di negeri Perlis pada tahun 2020 sehingga tahun 2022 terdapat perbedaan antara tiga tahun terakhir, jumlah bagi perceraian terdapat penurunan dan pertambahan dalam beberapa tahun terakhir diakibatkan daripada adanya beberapa faktor pergolakan dalam rumah tangga yang tidak dapat diselamatkan serta diselesaikan dengan kaedah yang lebih baik. Jumlah pada tahun 2020 adalah sejumlah 583 dan terdapat penurunan jumlah pada tahun berikutnya sebanyak 405 serta angka perceraian di Perlis melonjak naik sebanyak 801 pada tahun terakhir 2023, angka ini adalah sesuatu yang perlu dirisaukan dan adanya tindakan yang lebih progresif bagi menangani angka tersebut terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Dikarenakan seperti diungkapkan oleh Muhammad Hafeez Abu Seman yaitu Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pentadbiran Undang-Undang JAIPs, angka anggaran 1 000 pendaftaran bagi perceraian berlaku di negeri Perlis adalah suatu angka yang merisaukan dan selebihnya daripada setiap tahun terakhir berjaya dibendung beberapa sahaja daripada pendaftaran di Negeri Perlis.

Begitu juga dengan kasus keluarga yang ditangani oleh Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) Negeri Perlis, di mana pada tahun-tahun terakhir Malaysia dilanda wabak pandemi Covid-19 iya memberi suatu dampak pada kasus yang didaftarkan dan diuruskan oleh BSK bagi kasus yang diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syariah. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa jumlah kasus perceraian terjadi sepanjang tiga tahun terakhir mempengaruhi bilangan kasus nafkah di mana kedua-dua kasus ini hampir mempunyai kesamaan pada perangkaan ketiga-tiga tahun tersebut.

Table 8

Statistik Mal Kasus Nafkah Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) di Negeri Perlis Indera Kayangan bagi tahun 2020 - 2022

Tahun	Kasus Daftar	Kasus Selesai	Baki
-------	--------------	---------------	------

2020	82	60	22
2021	62	42	20
2022	82	70	12

Sumber: Data Statistik Kasus Tahunan Bahagian Sokongan Keluarga (BSK), Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perlis (JKSNP)

Berdasarkan tabel statistik yang terdapat di atas mengenai kasus-kasus yang diajukan sepanjang tahun 2020 sehingga tahun 2022, dapat dilihat sebanyak 226 kasus telah terdaftar di Mahkamah Syariah Negeri Perlis dan 162 kasus berjaya diselesaikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa BSK telah berusaha sebaik mungkin dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Jika dilihat daripada kasus yang diselesaikan dan didaftarkan dalam penyelesaian dalam aduan permohonan nafkah bawah BSK terdapat angka penurunan dan kenaikan daripada tiga tahun tersebut, yang merupakan sebuah perubahan drastis namun masih di bawah kawalan. Efektifitas BSK bagi penegakan perintah hukum mendapat pengakuan dari berbagai pihak. BSK telah membantu dalam memastikan perintah mahkamah dilaksanakan dimana sebelum terbentuknya BSK, tidak terdapat mana-mana pihak yang memantau pelaksanaan perintah di Mahkamah Syariah, akan tetapi setelah pembentukan BSK telah adanya pihak yang memantau setiap perintah yang dikeluarkan. Peningkatan pendaftaran kasus di Mahkamah Syariah meningkat secara mendadak setelah terwujudnya BSK dan di sini ia menunjukkan bahwa adanya kesedaran dari masyarakat dan pengetahuan tentang hak-hak mereka di sisi undang-undang. Di samping membantu tuntutan anak dalam menguatkuasakan perintah nafkah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah, hasil kajian juga menunjukkan bahwa BSK telah mempercepat dan memudahkan proses penyelesaian kasus dengan adanya tauliah peguam syar'ī.

Pada bab terdahulu, telah disebutkan bahwa indikator-indikator efektivitas cukup beragam sesuai dengan objek yang ingin dicari efektivitasnya. Dalam mengacu indikator efektivitas dapat dirumuskan dan dikutip terdiri daripada Kemudahan produktivitas atau *output*, Kemampuan adaptasi atau

fleksibilitas dengan perubahan yang ada dan kebolehan menangani hambatan atau kendala.⁹⁹ Ketiga indikator efektivitas ini hendaklah dipenuhi secara kumulatif, bukan sebagai alternatif. Dalam indikator efektivitas akan terlihat tidak mencapai tahap efektif jika tidak dapat menyesuaikan dengan komponen tersebut maka dapat dipersoalkan efektivitas peranan struktur tersebut. Untuk memperjelaskan soal efektivitas Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) Negeri Perlis, analisis diuraikan selaras dengan ketiga-tiga indikator tersebut:

1. Kemudahan produktivitas atau *output*

Produktivitas merupakan suatu konsep yang universal di mana intinya membicarakan tentang upaya menciptakan lebih banyak pembaharuan dalam meningkatkan mutu kebolehan.¹⁰⁰ Indikator efektivitas pada segmen produktivitas menunjukkan satu variabel terkait pernyataan sejauh mana pengajuan kasus dalam memberikan solusi penyelesaian terbaik. Hasil wawancara penulis lakukan di BSK Negeri Perlis mendapati sistem E-Nafkah dan E-Syariah dimanfaatkan secara maksimal pada tiga tahun terakhir, iya selaras dengan slogan Negeri Perlis “Perlis Go Digital” dalam tempoh lima tahun daripada tahun 2021 sehingga tahun 2025 yang fokus elemen utama kepada yaitu pihak pemerintah, rakyat dan industri swasta daripada salah satu daripada tujuh kluster tujuan adalah kepada perkhidmatan pemerintah.¹⁰¹ Gagasan daripada pemerintah Negeri Perlis untuk mewujudkan sebuah plan ini memberi ruang dan peluang kepada BSK Negeri Perlis bagi penggunaan sistem akses *online* menjadi lebih efisien.

⁹⁹ Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajmen Publik* (Jakarta: Gramedia Widisarna Indonesia 2005) hlm. 140

¹⁰⁰ Darmadi, *Manajmen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018) Hlm. 309

¹⁰¹ Plan Digital Perlis 2021 - 2025, Diakses pada 6/12/2023 dari situs <https://anyflip.com/ahnc/txwx>

Penggunaan E-Nafkah dan E-Syariah yang terbaru adalah versi yang ketiga yaitu 'E-SYARIAH V3 E-NAFKAH' dengan dikemaskini terakhir pada tahun 2022 memudahkan kepada pengurusan pengacara dan mahkamah syariah dalam menyusun atur permohonan dalam sebarang tuntutan. Bagi informasi berkaitan perintah nafkah yang didaftarkan di sistem E-Syariah akan otomatis diterima di dalam E-Nafkah, iya akan memudahkan pengawasan bagi status putusan yang berkaitan dengan nafkah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah dalam tempoh putusan tersebut dikeluarkan.

Manakala pemerintah Negeri Perlis telah menyediakan aplikasi khusus bagi yang ingin berurusan dengan agensi pemerintah Negeri Perlis yaitu Perlis E-Bayar, di mana aplikasi ini khusus bagi membolehkan pembayaran perkhidmatan dan bagi Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perlis (JKSNP) pembayaran bagi pendahuluan dana BSK Negeri Perlis serta pembayaran bagi kes mal boleh dilakukan selaras matlamat "Perlis Go Digital".

2. Kemampuan adaptasi atau fleksibilitas dengan perubahan yang ada

Salah satu indikator efektivitas lainnya adalah kemampuan adaptasi atau fleksibilitas dengan perubahan yang ada. Untuk indikator ini, tampak bahwa Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) Negeri Perlis boleh beradaptasi dengan situasi semasa dan fleksibel dalam putusan tuntutan bagi menyelesaikan masalah kasus nafkah didaftarkan semasa. Hal ini terkait terdapat beberapa kebijakan daripada pihak pengurusan BSK Perlis dalam menangani situasi pandemi Covid-19 yang melanda dengan disesuaikan melalui kelonggaran dalam tempoh waktu tunggakan nafkah dan inisiatif bantuan awal buat yang memerlukan.

Perkhidmatan diberikan oleh pihak Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perlis (JKSNP) Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) Negeri Perlis adalah bersifat langsung (*direct services*) pada asalnya sebelum tiga

tahun terakhir, namun kedatangan pandemi Covid-19 memberikan peluang kepada penggunaan secara penuh sistem E-Nafkah dan E-Syariah serta kebijakan hubungi secara atas talian secara langsung. Oleh itu, membolehkan adanya pembicaraan secara atas talian dan arahan-arahan amalan dengan syarat-syarat tertentu. Namun begitu, tetap perlu kepada permohonan tampil ke Mahkamah Syariah Negeri Perlis bagi memohon pendaftaran aduan kasus nafkah sebelum diambil tindakan oleh BSK Negeri Perlis.

Sistem melalui medium *online* ini sudah diperkenalkan sejak awal semasa wujud E-Nafkah dan E-Syariah, namun kesiapan muncul pada beberapa tahun kebelakangan ini. Kerana itu kepentingan adaptasi menjadi sebuah kunci utama BSK untuk menangani kasus pada tahun kebelakangan ini dalam memastikan tuntutan nafkah anak yang didaftarkan dapat dipenuhi.

3. Kebolehan menangani hambatan atau kendala

Indikator ketiga yang harus dipenuhi dalam menganalisis efektivitas adalah kemampuan dalam menangani hambatan atau kendala. Dalam konteks perkhidmatan berbasis kepada penggunaan sistem *online* yang dilakukan dalam layanan Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) Negeri Perlis hingga saat ini baik hambatan internal ataupun eksternal. Bagi kendala internal sepertinya tidak ada dan dapat dikawal dengan kebijakan yang baik dalam memastikan kasus nafkah terutamanya dapat berjalan dengan baik, berbeda dengan eksternal bagi pengguna perkhidmatan khidmat BSK Negeri Perlis untuk beradaptasi. Menurut Tuan Jaidil Akhtar Bin Mahamod, dalam memberikan keterangan soal situasi telah menyatakan seperti berikut:¹⁰²

¹⁰² Hasil wawancara dengan Mohd Jaidil Akhtar Bin Mahmod Penolong Pengarah Seksyen Bahagian Sokongan Keluarga di Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM), Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) Negeri Perlis, 20 April 2023

“Sistem E-Syariah dan E-Nafkah serta talian *Hotline On The Spot* sudah dipenuhi kesediaan bagi pengguna, namun pengguna masih belum bersedia sepenuhnya penggunaan tersebut. Rakyat Negeri Perlis belum bersedia menjadi hambatan utama dalam beberapa tahun terakhir dikarenakan situasi sangat memerlukan kepada perkara tersebut, namun kita berjaya menanganinya dengan baik.”

Adapun kendala eksternal dalam pelayanan berbasis sistem *online* masih dapat diteruskan proses persidangan dan perjalanan daripada aduan yang didaftarkan untuk tindakan BSK Negeri Perlis, seperti mengeluarkan tatacara secara infografik prosedur awal sehingga selesai dalam tempoh sedemikian perkara apa perlu dilakukan. Namun hambatan kepada kesediaan menerima perjalanan prosedur daripada pihak BSK daripada aduan adalah hambatan utama, kerana faktor Negeri Perlis dalam kemajuan dan celik kepada penggunaan teknologi masih belum meluas tidak seperti Negeri-negeri maju lain di Malaysia. Tindakan awal bermula dengan aduan dan kasus telah didaftarkan disalurkan sesuai dengan tindakan cara penyelesaian bagi yang masih ditahap rundingan diteruskan secara maya untuk rundingan, bagi yang masih di tahap perbicaraan diteruskan secara perbicaraan tetapi dengan kadar yang sesuai keizinan pada waktu tersebut.

Hasil dari wawancara yang telah penulis lakukan di BSK Negeri Perlis bersama Tuan Mohd Jaidil Akhtar Bin Mahamod selaku Penolong Pengarah Kanan Bahagian Sokongan Keluarga, didapati bahwa, setiap pihak yang gagal menghadirkan diri ke persidangan pada tanggal yang telah ditetapkan harus memaklumkan kepada pihak Mahkamah Syariah mengenai status kehadiran terdakwa dan iya perlu disertakan dengan alasan yang jelas dan kukuh. Sekiranya pihak tersebut tidak hadir ke pengadilan tanpa makluman serta alasan yang jelas, maka pihak tersebut dianggap sebagai sebuah penghinaan terhadap pihak Mahkamah Syariah dan pihak tersebut akan dikenakan sanksi yaitu denda dan penjara. Selain itu, di BSK turut terdapat kasus-kasus yang melibatkan pihak

yang kurang memiliki sikap komitmen serta toleransi dan menurut Tuan Jaidil, ini merupakan salah satu faktor kasus-kasus ini tidak dapat diselesaikan di tahap persidangan.¹⁰³

Seterusnya menurut Tuan Jaidil, yaitu Penolong Pengarah Seksyen Bahagian Sokongan Keluarga di Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM), Bahagian Sokongan Keluarga Negeri Perlis turut menggunakan kaedah negosiasi dimana ia merupakan salah satu dari tiga fungsi utama Bahagian Sokongan Keluarga yang lain, yaitu Unit Khidmat Nasihat dan Perundangan, Unit Penguatkuasaan dan Pelaksanaan Perintah dan Unit Pengurusan Dana.¹⁰⁴

Dalam menyelesaikan kasus nafkah, Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) menggunakan kaedah negosiasi dan BSK menggunakan kaedah proaktif tanpa perlu ke Mahkamah Syariah. Banyak kasus pengabaian nafkah diselesaikan menerusi kaedah negosiasi tanpa membabitkan prosiding (kasus tidak selesai ke tahap persidangan) sekaligus membela nasib anak daripada terus tertangguh. Langkah ini diambil bagi memastikan perintah nafkah dipatuhi, seterusnya bagi mengelakkan penganiayaan selain tunggakan tuntutan dilunaskan segera mengikut apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Syariah.

Jadi, berdasarkan contoh kasus nafkah yang disiarkan dan hasil wawancara penulis dapat dideskripsikan seperti berikut:

1. Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) Seksyen Negeri Perlis pada tanggal 10 Maret 2021 telah menyaksikan penyelesaian tunggakan nafkah anak secara tunai sejumlah RM5,650.00 oleh Penghutang Penghakiman.¹⁰⁵

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Mohd Jaidil Akhtar Bin Mahmod Penolong Pengarah Seksyen Bahagian Sokongan Keluarga di Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM), Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) Negeri Perlis, 20 April 2023

¹⁰⁴ Ibid.

¹⁰⁵ Antara kasus yang berjaya diselesaikan oleh Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) Negeri Perlis dipublikasikan di halaman rasmi Facebook Bahagian Sokongan Keluarga (BSK), pada tanggal 10 Maret 2021
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02s2DP2q1M9i8fuBZRSUh4P2tcigZPEdhPXiH5jaTYFEatrmizyQdJsoRzwrVHApgl&id=137685400144635&mibextid=9R9pXO

2. BSK Seksyen Negeri Perlis pada hari ini berjaya merekodkan penyelesaian kes tunggakan nafkah anak berjumlah RM1,500.00 melalui sesi runding cara yang dikendalikan oleh Pegawai Runding Cara BSK. Pihak-pihak telah berjaya mencapai persetujuan dengan bayaran tunai sebanyak RM750.00 pada hari ini manakala bakinya akan dilunaskan sebelum 31 Desember 2022.¹⁰⁶
3. Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) Seksyen Negeri Perlis juga turut merekodkan penyelesaian tunggakan nafkah anak berjumlah RM7,100.00 melalui sesi runding cara. Bayaran tunggakan sebanyak RM100.00 sebulan telah dipersetujui oleh pihak-pihak dan direkodkan sebagai perintah.¹⁰⁷

Jadinya dapat dilihat di sini bahwasanya pihak Bahagian Sokongan Keluarga telah mencuba menyelesaikan kasus-kasus ini dengan berbagai jenis inisiatif dan jalan bagi mengembalikan hak-hak kepada pihak yang sepatutnya. Justeru itu, setiap pihak hendaklah saling bekerjasama dalam menyelesaikan kasus-kasus ini agar tiada pihak yang teraniaya dan harus menyadari tanggung jawab masing-masing meskipun setelah berlakunya perceraian. Dengan adanya sifat toleransi dari semua pihak, maka petugas Bahagian Sokongan Keluarga akan menyelesaikan kasus-kasus nafkah tersebut dan inilah yang merupakan kunci kesuksesan dari tujuan pembentukan Bahagian Sokongan Keluarga di dalam Mahkamah Syariah.

D. Analisa Penulis

¹⁰⁶ Antara kasus yang berjaya diselesaikan oleh Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) Negeri Perlis dipublikasikan di halaman rasmi Facebook Bahagian Sokongan Keluarga (BSK), pada tanggal 23 November 2022

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02n4mn4AuRqku1FzqLCGiTFYndq9MsDMopd6tJoiF3TQMAQHIT86yzBoYxYqdFNAojl&id=100066509856064&mibextid=9R9pXO

¹⁰⁷ Antara kasus yang berjaya diselesaikan oleh Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) Negeri Perlis dipublikasikan di halaman rasmi Facebook Bahagian Sokongan Keluarga (BSK), pada tanggal 27 April 2021

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02n4mn4AuRqku1FzqLCGiTFYndq9MsDMopd6tJoiF3TQMAQHIT86yzBoYxYqdFNAojl&id=100066509856064&mibextid=9R9pXO

Berdasarkan penelitian dan observasi yang telah penulis dapatkan sepanjang penulis menyiapkan skripsi ini, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa permasalahan utama dalam menyelesaikan kasus nafkah adalah karena adanya pihak yang tidak melaksanakan amanah dan enggan memberikan kerjasama dalam memudahkan urusan pihak lain.

Faktor utama kebanyakan ayah tidak bertoleransi dikarenakan konflik dan emosi yang wujud akibat dari perceraian itu sendiri. Konflik seringkali muncul apabila adanya satu pihak yang menghalang, memaksa atau menekan pihak kedua agar menerima opininya dan ini menyebabkan pihak kedua merasa tergugat dengan tindakan yang telah dilakukan oleh pihak pertama.

Konflik dan pertikaian tidak dapat diselesaikan dengan baik dan sempurna dikarenakan wujudnya sikap egois yang tinggi dalam diri individu masing-masing serta sikap tidak berusaha untuk memahami dan mencari solusi bagi sebuah pertikaian. Andainya setiap pihak menerima dan mendengar pendapat dari pihak lain dengan berlapang dada dan saling memahami posisi pihak lain dengan baik, maka pertikaian seperti ini akan dapat diselesaikan dengan lebih aman.

Meskipun mayoritas masyarakat Islam di Malaysia menganggap penggunaan Mahkamah Syariah ini merupakan jalan terakhir dalam menyelesaikan permasalahan berkaitan kekeluargaan, namun hakikatnya itu adalah jalan yang terbaik untuk mendapatkan keadilan terhadap kedua-dua pihak yaitu si ayah dan si istri.

Penulis juga berhasil menemukan faktor lain mengapa ayah tidak mahu memberikan kerjasama dengan Mahkamah Syariah, yaitu dikarenakan mereka tidak memahami hukum Islam dengan baik. Mereka berpendapat seolah-olah setelah berlakunya perceraian maka berakhir lah tanggungjawab mereka terhadap istri tersebut walaupun dalam Al-Quran dan hadits telah dinyatakan dengan jelas tentang pemberian nafkah dari ayah kepada anak.

Sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W yang bermaksud, “Dan mereka (para isteri) mempunyai hak dan diberi rezeki dan pakaian (nafkah) yang diwajibkan atas kamu sekalian (wahai para suami)” (HR. Muslim 2137). Jadi dapat difahami bahwa nafkah itu perlu ditunaikan dan sekiranya ayah dapat memahami hadis ini dengan baik maka kasus-kasus nafkah pasti dapat diselesaikan dengan sempurna. Jadinya, di sinilah pihak Mahkamah Syariah di Bahagian Sokongan Keluarga berperan selaku mediator dalam menyelesaikan permasalahan dan konflik di antara ayah dan ibu kepada anak terutamanya dalam kasus nafkah. Melalui mediasi, pejabat Bahagian Sokongan Keluarga dapat mengetahui dengan lebih rinci mengenai penyebab terjadinya pengabaian dalam melaksanakan putusan nafkah yang telah ditetapkan oleh pihak Mahkamah Syariah.

Hasil dari mediasi tersebut, pihak Bahagian Sokongan Keluarga akan mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam penuntutan nafkah anak. Jika masalah ibu dan ayah tersebut tidak dapat diselesaikan melalui mediasi, maka solusi penyelesaiannya adalah melalui proses Mahkamah Syariah. Dalam penegakan perintah mahkamah yaitu melalui sanksi terhadap si ayah (penghutang penghakiman) dan proses penyelesaian ini mengambil waktu yang agak lama sekiranya saman penghutang penghakiman tidak dapat diserahkan kepada ayah.

Terkini dari pihak Bahagian Sokongan Keluarga, mereka telah menggunakan kaedah proaktif tanpa perlu ke Mahkamah Syariah yaitu melalui kaedah negosiasi tanpa melibatkan prosiding (tindakan hukum) perbicaraan sekaligus membela nasib isteri yang telah diceraikan. Kaedah ini dilaksanakan melalui dua cara yaitu melalui aduan dan E-Nafkah. E-Nafkah merupakan sebuah situs web yang diwujudkan bagi memudahkan pihak terlibat melakukan aduan seiring zaman milenial ini.

Berdasarkan analisis yang telah penulis laksanakan, dapat ditarik beberapa poin penting dalam menyelesaikan kasus-kasus kekeluargaan terutama

berkaitan nafkah, yaitu setiap pihak mempunyai tanggung jawab dan peran dalam mencari solusi permasalahan ini termasuk si ibu. Seringkali ibu dikaitkan sebagai mangsa keadaan namun hakikatnya, permasalahan ini tidak akan dapat diselesaikan sekiranya si ibu berdiam diri tanpa melakukan sebarang aduan terhadap pihak Bahagian Sokongan Keluarga. Perbuatan berdiam diri tersebut hanya akan mendatangkan kemudharatan terhadap si ibu dalam kehidupan sehariannya.

Pihak Bahagian Sokongan Keluarga telah mewujudkan berbagai jenis kaedah dan cara bagi menyempurnakan jalan penyelesaian terhadap setiap kasus sesuai kondisi peredaran zaman. Yang diperlukan, hanyalah komitmen dan kerjasama dari semua pihak yaitu ayah dan ibu demi menjaga kemaslahatan bersama.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa perkara yang menyangkut perbahasan ini. Adapun kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Peran utama Bahagian Sokongan Keluarga adalah menyelesaikan masalah pemenuhan nafkah anak pasca perceraian terlaksana dengan memantau dan menangani masalah kepatuhan ayah terhadap perintah nafkah Mahkamah Syariah melalui pembentukan Unit Khidmat Nasihat dan Perundangan, Unit Penguatkuasaan dan Pelaksanaan Perintah dan Unit Pengurusan Dana.
2. Bahagian Sokongan Keluarga memfokuskan pada permasalahan nafkah anak yang tidak ditunaikan oleh ayah pasca perceraian dengan mengutamakan proses penegakan dan pelaksanaan perintah, hal ini karena kewajiban mahkamah untuk memastikan semua perintah yang dikeluarkan dapat dilaksanakan sehingga pihak-pihak yang berhak dapat manfaat yang diperintah. Dengan menggunakan sistem E- Syariah, semua informasi berkaitan perintah nafkah yang terdaftar di sistem E-Syariah akan terus dikirim ke sistem E-Nafkah secara automatis. Dengan demikian, Petugas Pembantu Syariah yang bertugas dapat melakukan pemantauan harian atas perintah berkaitan nafkah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah.
3. Efektifitas Bahagian Sokongan Keluarga dalam melakukan tindakan terhadap masalah penegakan nafkah anak pasca perceraian yaitu berdasarkan undang-undang pada Seksyen 73 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Perlis 2006 tentang hak anak untuk menuntut nafkah semasa perkawinan dan setelah perceraian. Bahagian Sokongan

Keluarga menjadi tempat rujukan untuk mendapatkan bantuan bagi mereka yang tidak mendapat nafkah karena kegagalan ayah untuk mematuhi perintah mahkamah serta memastikan perintah Mahkamah Syariah dihormati dan diimplementasikan secara baik.

Pada waktu pandemi, dapat dilihat penurunan secara drastik kasus yang dapat diselesaikan daripada kasus yang didaftarkan menurut laporan tahunan dari pada Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia tahun 2020 sehingga 2022. Oleh itu, peran Bahagian Sokongan Keluarga telah berjaya beradaptasi dengan situasi tersebut dan memberikan ruang kepada peningkatan kemajuan dari sudut penggunaan teknologi secara meluas kepada mereka yang ingin berurusan dengan Mahkamah Syariah Negeri Perlis sesuai dengan gagasan pemerintah negeri Perlis yaitu “Perlis Go Digital”.

Pokok permasalahan dalam penyelesaian masalah pengabaian nafkah apabila ayah memahami hal berkaitan hukum agama Islam serta mengetahui hak dan tanggung jawab terhadap anak pasca perceraian. Berdasarkan statistik kasus mal nafkah Bahagian Sokongan Keluarga daripada tahun 2020-2022, efektifitas dalam penegakan perintah hukum nafkah mendapat legalitas dari berbagai pihak yang berkuasa. Fungsi Bahagian Sokongan Keluarga juga telah memberi keistimewaan dalam menyelesaikan kasus nafkah yaitu tanpa perlu ke mahkamah dengan menggunakan kaedah negosiasi dan kaedah proaktif.

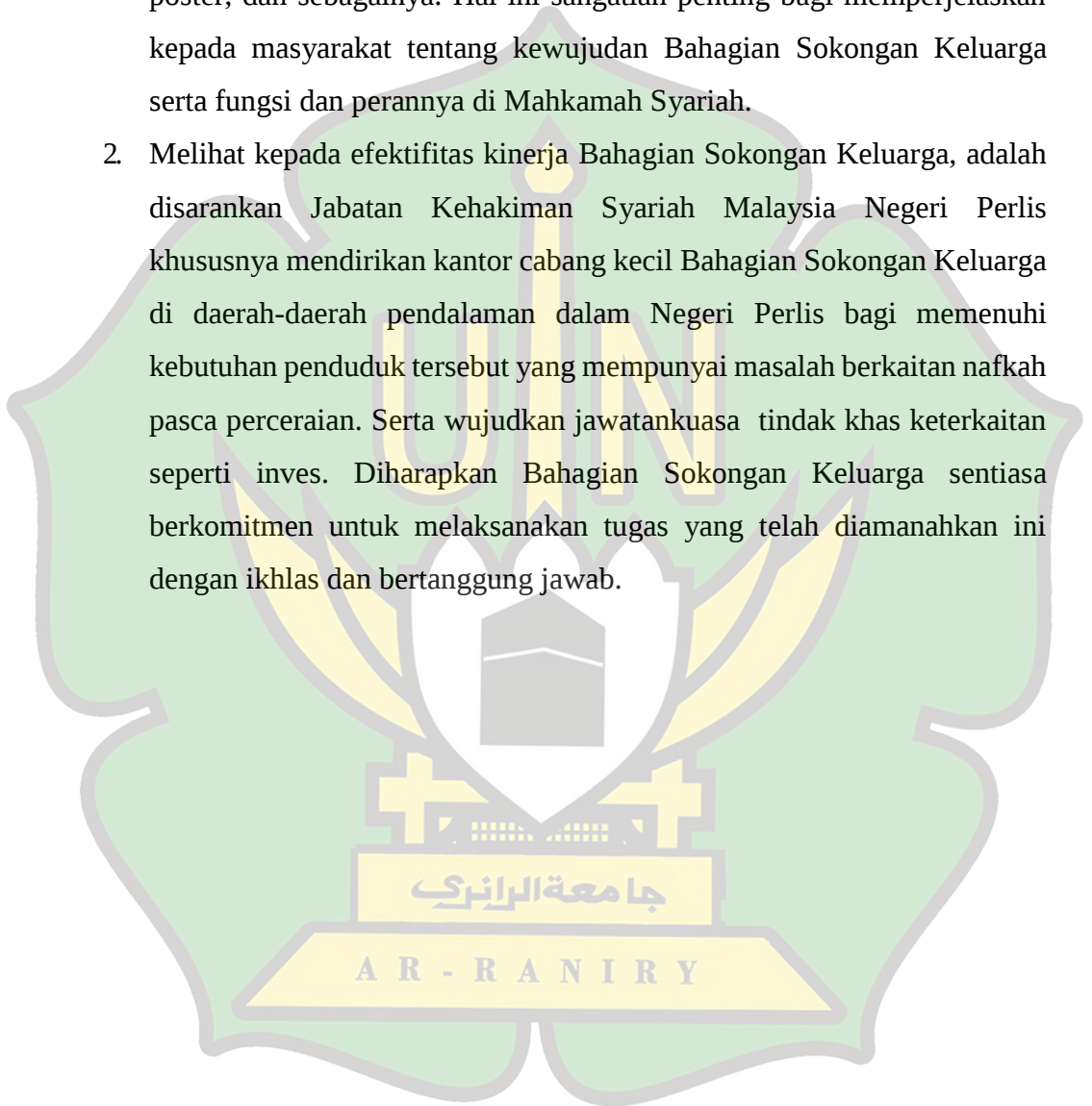
B. Saran

Berdasarkan dari penjelasan dan kesimpulan dalam skripsi ini penulis ingin menyarankan beberapa hal, diantaranya yaitu:

1. Pembentukan Bahagian Sokongan Keluarga merupakan suatu usaha murni bagi membela nasib isteri yang tidak mendapat nafkah pasca perceraian. Namun begitu, masih ramai masyarakat yang belum mengetahui akan keberadaan Bahagian Sokongan Keluarga. Oleh itu, penulis menyarankan agar pihak pemerintah dapat mempromosikan akan

keberadaan Bahagian Sokongan Keluarga di Mahkamah Syariah atau memasyhurkan nama Bahagian Sokongan Keluarga di peringkat Nasional melalui media seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan sebagainya. Hal ini sangatlah penting bagi memperjelaskan kepada masyarakat tentang kewujudan Bahagian Sokongan Keluarga serta fungsi dan perannya di Mahkamah Syariah.

2. Melihat kepada efektifitas kinerja Bahagian Sokongan Keluarga, adalah disarankan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia Negeri Perlis khususnya mendirikan kantor cabang kecil Bahagian Sokongan Keluarga di daerah-daerah pendalaman dalam Negeri Perlis bagi memenuhi kebutuhan penduduk tersebut yang mempunyai masalah berkaitan nafkah pasca perceraian. Serta wujudkan jawatankuasa tindak khas keterkaitan seperti inves. Diharapkan Bahagian Sokongan Keluarga sentiasa berkomitmen untuk melaksanakan tugas yang telah diamanahkan ini dengan ikhlas dan bertanggung jawab.



DAFTAR PUSTAKA

- Nasrudin Bin Hassan & Wan Hamidah Binti Wan Daud, *Fiqh Keluarga Syurgawi*, Pekan Sungai Besi, Kuala Lumpur : Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, 2021
- Mustofa Al-Bugho & Ali Asy-Syarbaji, Mustofa Al-Khin, *Kitab Fikah Mazhab Syafie*, Batu Caves, Kuala Lumpur : Pustaka Salam, 2014
- Najibah Mohd Zin, *Undang-Undang Keluarga Islam*, Siri perkembangan undang-undang di Malaysia, 2007
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004
- Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993
- Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, Cet. 3, Jakarta : Amzah, 2014
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Bandung : Pustaka Setia, 2007
- Kamus Undang-Undang, Selangor: Oxford Fajar Sdn. Bhd., 2007
- Sudarsono, *Kamus Hukum*: Edisi Baru, Jakarta : Rineka Cipta & Bina Adiaksara, 2015
- M. Nashiruddin Al-Abani, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, 1042, Jakarta : Gema Insani, 2007, Cetakan 1, Jilid 2
- Al-Ghundur, Ahmad, *al-Ahwal al-Shakhsiyyah fi al-Tashri' al-Islami*. Edisi Keempat. Maktabah al-Fallah: Kuwait, 1413H/1992
- Al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Dar al-Fikri: Beirut. Jilid 3, 1421H/2001
- Al-Marghinani, Burhanuddin Ali ibn Abi Bakr, *al-Hidayah Sharh Bidayat al-Mubtadi*, Dar al-Salam, Kaherah, 1420H/2000, Jilid 3
- Sha'ban, Zaki al-Din, *al-Ahkam al-Shar'iiyah li al-Ahwal al-Shkasiyyah*. Jami'ah Qaryunus: Banghazi, 1993
- Mahmud Saedon A. Othman, 1998, *Institusi Pentadbiran Undang-undang & Kehakiman Islam*, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa & Pustaka

Perkahwinan & Kompilasi Hukum Islam, Cetakan 9, Bandung: Citra Umbara, November 2017

Udin Safala, *Naflah Anak Pasca Perceraian dan Kerabat Menurut Abu Zahra dan Implikasinya Bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia*, Jogja : Stain Press Ponorogo

Al-Nazzam, *al-Fatawa al-Hindiyyah fi Madhhab Imam Abi Hanifah* Dar al- Fikr, Jilid 4, 1411H/1991M

Ibrahim bin Abi al-Yaman Muhammad al-Hanafi, *Lisan al-Hukkam fi Ma'rifah al- Ahkam* Kaherah: al-Bab al-Halabi, Jilid 1, 1393H/1973M

Al-Mawardi, *al-Hawi fi Fiqh al-Shafi'iyy* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Jilid 11, 1414H/1994M

Al-Nawawi, *al-Majmu'* Beirut: Dar al-Fikr, Jilid 18

'Abd Allah bin Ahmad Ibn Qudamah, *al-Mughni fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal* Beirut: Dar al-Fikr, Jilid 9 1404H/1984M

Mustafa al-Khin, Mustafa al-Bugha & 'Ali al-Sharbaji, *al-Fiqh al-Manhaji* Damsyiq: Matba'ah al-Sabah, Jilid 4, 2005

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemah oleh Nor Hasanuddin dkk, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2007 Cetakan ke-2

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1998

Al-Zarkashi, Sham s al-Din Muhammad ibn Abdullah, *Sharh al-Zarkhshi ala Mukhtasar al-Khiraqi*, Maktabah al-'Ubaykan, Riyadh, 1413/1993, Jilid 6

Ibn al-Humam, Kamal al-Din Muhammad ibn Abd al-Wahid al-Siwasi, *Sharh Fath al-Qadir*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 1995/1415, Jilid 4

Al-Shirazi, Abi Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf al-Fyruz Abadi, *al-Muhadhdhab*, Dar Ihya' al-Turath al-Arabi, Beirut, 1414/1994, Jilid 2

Al-Dimyati, al-Sayyid al-Bakri ibn al-Sayyid Muhammad Shata, *Hashiyah I'annah al-Talibin*, Dar al-Fikr, Beirut, 1422/2002, Jilid 4

Ibn Muflih, Abi Ishaq Burhan al-Din Ibrahim ibn Muhammad, *al-Mubdi' Sharh al-Muqni'*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1418/1997, Jilid 7

Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat Bahasa, 2008

Alie Humaedi, *Etnografi Bencana: Menakar Peran Para Pemimpin Lokal dalam Pengurangan Resiko Bencana*, Yogyakarta : LKiS, 2015

Muhammad Sawir, *Birokrasi Pelayanan Publik: Konsep, Teori, & Aplikasi*, Yogyakarta : Deepublish, 2020

John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1992

Abdul Rahman Nur, *Konsepsi Negara Nachwachtes Staat Menuju Negara Welfare Staat dalam Menata Kota Palopo*, Palopo : Guepedia, 2018

Kurhayadi, Yeti Rohayati, dan Bambang Sucipto, *Kebijakan Publik di Era Digitalisasi*, Yogyakarta : Deepublish, 2020

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika 2012

Taufiqurokhman dan Evi Satispi, *Teori dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik*, Tangerang : UMJ Press, 2018

Hessel Nogi Tangkilisan, *Manajemen Publik*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005

Seksyen 72 (1) dan (2), Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Perlis 2006

Constitution of Malaysia, Part I: *The States, Religion And Law of Federation*, Article Number 3 point 1

Akta 303 Undang-undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984

Akta Undang-undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984, Akta 303, Seksyen 78

Akta Undang-undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984, Akta 303, Seksyen 72 Ayat 1

Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah 2006, Kaedah-Kaedah Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah Sulh Perlis 2018 Undang-Undang Perlis 17 Januari 2019

Mohd Radzi Abd Latif, *Laporan Tahunan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia*, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, Putrajaya : Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, 2011

Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. 2021. *Laporan Tahunan JKSM 2020*. Oktober. Nassir bin Abdul Aziz. Kuala Lumpur. Malaysia.
<https://fliphtml5.com/wsnr/eeoz/basic/51-100>

Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia Jabatan Perdana Menteri, *Bahagian Sokongan Keluarga (BSK)*,

Roslina Che Jusoh, *Jurnal Kanun, Bahagian Sokongan Keluarga Membantu Anak Selepas Perceraian: Keberkesanan, Cabaran Dan Perbandingan Dengan Amalan Negara Maju*, 2017

Jazilah Mohd Saad @Mat Saud, Muhammad Amir Firdaus Sidin dan Hanna Ambaras Khan. Februari 2020. International Conference on Family Law 2020. *Penggunaan Mediasi di Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) (2010-2020): Satu Analisa*.

Nur Zulfah Md Abdul Salim dan Nur Syazwani Mohd Khatib. 29 April 2020. Jurnal of Muwafaqat. *Isu Tunggakan Nafkah : Keperluan Penubuhan Bahagian Sokongan Keluarga (BSK)*.

Zulzaidi Mahmod, Ahmad Hidayat Buang dan Afifah Baharuddin. 16 Februari 2022. *Cabaran Pemerkasaan Literasi Maklumat Penguatkuasaan Penghakiman Mahkamah Syariah Melalui Peranan Bahagian Sokongan Keluarga di Sarawak*.

Zulzaidi Mahmod, Ahmad Hidayat Buang dan Afifah Baharuddin. September 2021. Journal of Islamic, Social, Economics and Development (JISED). *Penguatkuasaan dan Pelaksanaan Penghakiman Mahkamah Syariah : Kajian di Bahagian Sokongan Keluarga Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (Seksyen Sarawak) Terhadap Hak Wanita dan Kanak-Kanak*.

Badrudin Hj Ibrahim & Azizah Mohd, *Hak Ibu Bpa Terhadap Nafkah Anak Dalam Perundangan Islam, Kanun, Jun 2012*

Zaharah Jaafar, '*Penetapan Kadar Nafkah Isteri: Satu Kajian di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan*', (Disertasi Sarjana, Akademik Pengajian Islam Universitas Malaya, 2005)

Raihanah Azahari, Bahiyah Ahmad & Asmak Ab Rahman, 2012, Penentuan Kadar Kifayah dan Ma'ruf Nafkah Anak dan Isteri: Kajian Terhadap Penghakiman Mahkamah Syariah, *Jurnal Syariah Jilid 20 No. 2*

Raihanah Azahari, Bahiyah Ahmad & Asmak Ab Rahman, 2012, Penentuan Kadar Kifayah dan Ma'ruf Nafkah Anak dan Isteri: Kajian Terhadap Penghakiman Mahkamah Syariah, *Jurnal Syariah Jilid 20 No. 2*

Jurnal Hukum XV1 Bhg 11 (2003), 101 – 116. Rujuk juga kes *Hj Ghazali lwn Asmah*, *Jurnal Hukum* (1985), 55 kes *Wan Azmi lwn Nik Salwani* 1 *Jurnal*

Hukum (2)(1977), 81 dan kes *Rasnah Arifin lwn Shafri Khalid* (Kes Mal No.03-125/2000) Mahkamah Rendah Syariah Butterworth, Pulau Pinang

Jurnal Hukum 30 Bhg 1, (1431/2010), 111. Rujuk juga kes *Khatija A/P Yusoff dan Shaik Abdul Kadir bin Kadar Bacha* (kes Mal 695/1997 MRSWP, kes yang tidak dilaporkan)

Jurnal Hukum 27 Bhg II (1430/2009)

Badrudin Hj Ibrahim & Azizah Mohd, *Hak Anak Terhadap Nafkah Dalam Perundangan Islam: Sejauh Manakah Bapa Bertanggungjawab Menanggung Nafkah Anaknya*, (Selangor: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Disember 2013)

Suwaid Tapah, 'Nafkah Isteri', dalam Abdul Munir & Siti Shamisiah Md Supi (eds.), *Manual Undang-undang Keluarga Islam* (Kuala Lumpur: Institusi Kefahaman Islam Malaysia 2006)

Nan Mardhiatul Akmal binti Long Kamaruddin, "*Efektifitas Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) dalam Penyediaan Dana Cadangan Untuk Nafkah Isteri dan Anak (Studi Kasus di Mahkamah Tinggi Syariah Terengganu)*", (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015

QS. At-Talaq (65): 6

Damang, 2011, Efektivitas Hukum (*online*), Diakses pada 22/12/2023 dari situs <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum.html>,

Muhammad Joni, 2003, Efektivitas Penerapan Hukum (*online*), Diakses pada 22/12/2023 dari situs <http://www.advokatmuhammadjoni.com/opini/artikel-hukum/181-efektifitas-penerapan-hukum.html>,

Portal Rasmi Jabatan Agama Islam Negeri Perlis, Diakses dari situs <https://jaips.perlis.gov.my/index.php/ms/profil-jabatan/latarbelakang-jheaiips>

Gerbang Rasmi Kerajaan Malaysia pada perkhidmatan Mengurus Institusi Keluarga kategori Khidmat Bantuan Bahagisan Sokongan Keluarga (BSK), diakses dari situs <https://www.malaysia.gov.my/portal/content/28866?language=my>

Portal Rasmi Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Diakses dari situs <http://www.mswp.gov.my/index.php/ms/mengenai-mswp/perkhidmatan/bahagian-sokongan-keluarga/maklumat-am/>

Portal Pressreader, Berita Harian Malaysia, Diakses dari situs [PressReader.com](https://www.pressreader.com/malaysia)
- [Digital Newspaper & Magazine Subscriptions](https://www.pressreader.com/malaysia)

Portal Rasmi Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Diakses dari situs
<http://www.mswp.gov.my/index.php/ms/mengenai-mswp/perkhidmatan/bahagian-sokongan-keluarga/fungsi-peranan/unit-pengurusan-dana-upd/MahkamahSyariahdiMalaysia>.

Portal Rasmi Majlis Agama Islam & Adat Istiadat Melayu Negeri Perlis (MAIPs), diakses pada 6/12/2023 dari situs
https://maips.gov.my/index.php?option=com_k2&view=item&id=2780:kes-perceraian-jaips-terima-1-000-permohonan-setiap-tahun&Itemid=834&lang=img

Plan Digital Perlis 2021 - 2025, Diakses pada 6/12/2023 dari situs
<https://anyflip.com/ah nec/txwx>

Antara kasus yang berjaya diselesaikan oleh Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) Negeri Perlis dipublikasikan di halaman rasmi Facebook Bahagian Sokongan Keluarga (BSK), pada tanggal 10 Maret 2021
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02s2DP2q1M9i8fuBZRSUh4P2tcigZPEdhPXiH5jaTYFEatrmizyQdJsoRzwrVHApbgl&id=137685400144635&mibextid=9R9pXO

Antara kasus yang berjaya diselesaikan oleh Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) Negeri Perlis dipublikasikan di halaman rasmi Facebook Bahagian Sokongan Keluarga (BSK), pada tanggal 23 November 2022
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02n4mn4AuRqku1FzqL CGiTFYndq9MsDMopd6tJoiF3TQMAQHIT86yzBoYxYqdFNAojl&id=100066509856064&mibextid=9R9pXO

Antara kasus yang berjaya diselesaikan oleh Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) Negeri Perlis dipublikasikan di halaman rasmi Facebook Bahagian Sokongan Keluarga (BSK), pada tanggal 27 April 2021
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02n4mn4AuRqku1FzqL CGiTFYndq9MsDMopd6tJoiF3TQMAQHIT86yzBoYxYqdFNAojl&id=100066509856064&mibextid=9R9pXO

Tuan Mohd Jaidil Akhtar Bin Mahamod, Wawancara Pengarah Kanan di Seksyen Bahagian Sokongan Keluarga (BSK), Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perlis (JKSNP), 20 April 2023

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Amjad Irfani Bin Arpan
Tempat/Tanggal Lahir : Hospital Kuching, Sarawak/04 September 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kebangsaan/Kaum : Malaysia / Melayu
Alamat : No 15, Taman Desa Kayang, Kangar, Perlis
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa / 170101093
Status : Belum nikah
E-mail : amjadirfani11@gmail.com
Nama Orang Tua/Wali
Ayah : Arpan Bin Shaari
Pekerjaan : Guru
Ibu : Basyira Binti Omar
Pekerjaan : Guru
Riwayat Pendidikan
Sekolah Dasar : SRK Seri Indera. Kangar, Perlis
Sekolah Menengah : SMK Tuanku Lailatul Shahreen, Kangar, Perlis
Perguruan Tinggi S1 : Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh
Demikian daftar riwayat hidup saya yang sebenarnya.

Banda Aceh, 26 Desember 2023


Amjad Irfani Bin Arpan



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor: 1457/Un.08/FSH/PP.00.9/03/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI**

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Dr. Badrul Munir, Lc., MA

b. Muhammad Husnul, M.H.I.

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Amjad Irfani Bin Arpan
NIM : 170101093
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Judul : Efektivitas Peran Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) dalam Penuntutan Nafkah Anak Pasca Perceraian Periode 2020-2022 (Studi di Mahkamah Tinggi Syariah Perlis, Malaysia)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Maret 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 373/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2023
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

SEKSYEN BAHAGIAN SOKONGAN KELUARGA (BSK) NEGERI PRRLIS

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **AMJAD IRFANI BIN ARPAN / 170101093**
Semester/Jurusan : / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : NO 15 JALAN DESA KAYANG 3 TAMAN DESA KAYANG 01000 KANGAR, PERLIS

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Tbu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **EFEKTIVITAS PERAN BAHAGIAN SOKONGAN KELUARGA (BSK) DALAM PENUNTUTAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN PERIODE 2020-2022 (Studi di Mahkamah Tinggi Syariah Perlis, Malaysia)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 13 Januari 2023 an.
Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.



Gambar I Sesi wawancara bersama Tuan Jaidil Akhtar Bin Mahamod, Pengarah Kanan di Seksyen Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) di Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perlis (JKSNP)



Gambar II Penyampaian Cenderahati kepada Tuan Jaidil Akhtar Bin Mahamod sebagai tanda penghargaan atas masa dan tempat yang diluangkan

